

Perencanaan penggunaan lahan untuk
pembangunan rendah emisi

Luwes

Land-use planning for low-emission
development strategies

NEWS BULLETIN

VOLUME II NO.2/NOVEMBER 2015



RENCANA AKSI MITIGASI LOKAL: TURUNKAN EMISI, TINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI BUMI SRIWIJAYA

Locally Mitigation Action
Plans: Reducing the
emissions, improving
the green economic
development in Sriwijaya
Land.

POLA PEMANFAATAN LAHAN HUKUM ADAT: WARISAN BUDAYA CERMINAN DAMAI DI BUMI CENDERAWASIH

Patterns of customary law land
use: A cultural heritage of peace
in Cendrawasih Land

SINERGITAS RENCANA KERJA BERSAMA POKJA: DARI RENCANA MENUJU AKSI BERSAMA

Synergy of the work plan
with the working group:
From planning to collective
action



Dari Redaksi

Editor's notes

LUWES News Bulletin kembali menjumpai para pembaca di edisi ke empat dengan berbagai ragam informasi, cerita dan pembelajaran tentang kegiatan penguatan kapasitas baik teknis maupun kelembagaan yang dilakukan oleh World Agroforestry Center (ICRAF) bersama mitra konsorsium dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia melalui program *Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies* (ParCiMon) yang dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Papua dan *Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia* (LAMA-I) yang dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dan tiga kabupaten di Provinsi Papua.

Artikel kegiatan Lokakarya Provinsi Sumatera selatan yang di selenggarakan Juni 2014 di Palembang menjadi salah satu artikel dalam *LUWES News Buletin* edisi ke empat ini. Lokakarya Provinsi ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk untuk membangun kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menyusun rencana pembangunan rendah emisi sekaligus memaparkan hasil pembelajaran dari tiga kabupaten lokasi program LAMA-I di Sumatera Selatan.

Di edisi November ini juga memuat artikel dari tanah papua mengenai Kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Kabupaten Merauke. Didalam artikel ini tertuang rencana aksi mitigasi yang telah disusun oleh Pokja Kabupaten Merauke, sekaligus dukungan yang diberikan oleh multi-pihak khususnya Bupati Kabupaten Merauke untuk mensinkronisasikan rencana aksi mitigasi kedalam rencana pembangunan daerah.



The *LUWES News Bulletin* is back in this fourth edition with a wide range of information, stories and lessons learned regarding the technical and institutional capacity building carried out by the World Agroforestry Center (ICRAF). ICRAF, together with the consortium partners and the local government, is supporting the development of a green economy, sustainable Indonesia through Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies (ParCiMon) which is being conducted in three districts in Papua and Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I) actions that were carried out in three districts in South Sumatra and three districts in the province of Papua.

The South Sumatra Provincial Workshop which was held in June 2014 in Palembang, is one of the highlights in this fourth edition of the *LUWES News Bulletin*. This provincial workshop was an activity aimed at building awareness and understanding of the importance of low-emission development planning as well as disseminating the lessons learnt from the three districts of the LAMA-I program located in South Sumatra.

This *LUWES News Bulletin* also contains articles from the land of Papua such as an update on the Public

Artikel lain yang tak kalah menarik untuk di simak adalah artikel mengenai pembagian wilayah di Kabupaten Jayapura berdasarkan hukum adat yang telah di praktikan sejak jaman nenek moyang masyarakat Papua. Pembagian wilayah ini dapat berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan hijau dengan upaya mensinergikan pembagian wilayah berdasarkan hukum adat yang berlaku dengan perencanaan penggunaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jayapura.

Ulasan mengenai pertemuan tahunan yang ke tiga tim penasihat program LAMA-I atau yang disebut *Project Advisory Committee* (PAC), turut di sampaikan dalam *LUWES News Buletin* kali ini. Artikel ini memuat berbagai informasi yang di diskusikan diantara para tim penasihat dan anggota (PAC) sekaligus kesepakatan yang dihasilkan mengenai rencana kerja tahun ketiga program LAMA-I.

Sekelumit informasi mengenai Drs Hana Hikoyabi turut di tuangkan dalam *LUWES News Buletin* kali ini, tim penulis ingin mengangkat tokoh yang sangat berperan dalam pembangunan di Kabupaten Jayapura, tidak hanya perannya sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, penulis juga ingin menyampaikan sisi lain dari Drs Hana Hikoyabi yang dikenal dengan kegigihannya memperjuangkan aspirasi kaum perempuan dan anak-anak di Papua.

Dengan terbitnya *LUWES News Bulletin* edisi ke empat ini, tim penulis berharap dapat menghadirkan informasi yang bermanfaat sekaligus menginspirasi para pembaca terkait upaya-upaya yang dilakukan melalui kegiatan ParCiMon dan LAMA-I menuju pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia.

Akhir kata, kami dari redaksi mengucapkan selamat membaca.

Salam lestari

Consultation activity by the Merauke Working group. This article provides information regarding the mitigation action plans that have been prepared by the Merauke Working Group, as well as the support provided by the multi-stakeholders especially from the Regent of Merauke in order to synchronize mitigation action plans into local development plans.

Another article of interest is on the zoning in Jayapura based on customary law that has been practiced by ancestors in Papua. The division of the region can contribute to the implementation of green development by synergizing the zoning based on customary law applicable to land-use planning by local governments in Jayapura.

The project advisory committee (PAC) annual meeting of the LAMA-I program is covered in this *LUWES News Bulletin*. The article contains information on what was discussed among the team of advisors and PAC members as well as the follow up agreement regarding the LAMA-I third-year work plan.

A biographic article highlights Drs Hana Hikoyabi in this edition, and the writer has captured her tremendous role in Jayapura Development—not just as the Head of the Jayapura Planning Agency. The author reveals another side of Drs Hana Hikoyabi regarding her commitment to fight for the aspirations of women and children in Papua.

The publication of the fourth edition of the *LUWES News Bulletin* aims to provide useful information to inspire readers by promoting the efforts of the many participants in ParCiMon and LAMA-I toward sustainable green economic development in Indonesia.

Finally, we wish you Happy Reading!
Sincerely,

EDITORIAL TEAM
LUWES NEWS BULLETIN
Volume II No.2
November 2015

Editors in chief	:	Suyanto and Sonya Dewi
Managing editors	:	Robert Finlayson, Burhanuddin Zein, Andree Ekadinata, Feri Johana, and Yessi Dewi Agustina
Contributors	:	ParCiMon and LAMA-I team
Layout and design	:	Sadewa
Editorial secretariat	:	Tikah Atikah, Cintin Sakina
Cover photo	:	Yessi Dewi Agustina

Daftar Isi

Table of Contents



02	DARI REDAKSI Editor's notes
05	RENCANA AKSI MITIGASI LOKAL: TURUNKAN EMISI, TINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI BUMI SRIWIJAYA Locally Mitigation Action Plans: Reducing the emissions, improving the green economic development in Sriwijaya Land.
10	PROJECT ADVISORY COMMITTEE (PAC) MEETING: PELUANG DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN HIJAU DI INDONESIA Project Advisory Committee (PAC) Meeting: Opportunity and Challenge Towards Green Development in Indonesia
15	MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN AKSI MITIGASI PADA TINGKAT LOKAL; CATATAN PROSES PENINGKATAN KAPASITAS PROVINSI DALAM REVISI RAD GRK TAHUN 2015 Empowering local stakeholders in the compilation of local mitigation actions: Learning notes on provincial-level capacity building in the 2015 RAD-GRK revision
18	POLA PEMANFAATAN LAHAN HUKUM ADAT: WARISAN BUDAYA CERMINAN DAMAI DI BUMI CENDERAWASIH Patterns of customary law land use: A cultural heritage of peace in Cendrawasih Land
23	OPTIMALISASI PERAN MULTI-PIHAK: KUNCI SUKSES TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI KABUPATEN MERAUKE The optimization of multi-party roles: The key to success of green economy development in Merauke district
28	SINERGITAS RENCANA KERJA BERSAMA POKJA: DARI RENCANA MENUJU AKSI BERSAMA Synergy of the work plan with the working group: From planning to collective action
32	BIOGRAFI HANA HIKOYABI: MENYUARAKAN ASPIRASI PEREMPUAN DIBAWAH LANGIT PAPUA The Biography of Dra Hana Hikoyabi: Voicing the aspiration of women under the sky of Papua

Rencana Aksi Mitigasi Lokal: Turunkan emisi, tingkatkan pembangunan ekonomi hijau di Bumi Sriwijaya

Locally Mitigation Action Plans: Reducing the emissions, improving the green economic development in Sriwijaya Land.

Aksi mitigasi dari sektor berbasis lahan membutuhkan proses perencanaan penggunaan lahan yang menggunakan pendekatan bentang lahan secara transparan, kredibel, dan bertanggung jawab.

The mitigation actions of land-based systems need a land-use planning process that is based on a transparent, credible and responsible landscape approach.

Pemanasan global yang dirasakan oleh masyarakat dunia merupakan konsekuensi yang terjadi akibat pembangunan. Perubahan iklim tidak bisa dihindari karena aktivitas pembangunan yang kian meningkat. Sumber-sumber emisi yang berasal dari sektor energi, pertanian, penggunaan lahan dan kehutanan dan sektor limbah semuanya di hasilkan dari aktivitas pembangunan. Meningkatnya aktivitas pembangunan berdampak kepada menurunnya kondisi lingkungan sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana ekstrim. Bencana iklim yang terjadi dengan rata-rata sekali dalam lima tahun di Indonesia telah mempengaruhi

The global warming which is being experienced by the society worldwide is a consequence of development—climate change is unavoidable due to increasing development. All sources of emissions from energy, farming, land use, forestry and waste sectors have resulted from development activity. The increase in development activity has had an impact on the decline in environmental conditions, raising the potential for extreme disasters to occur. Climate disasters which have occurred once every five years on average in Indonesia have affected the Indonesian economy badly, with a total loss of around USD 10 billion.

perekonomian di Indonesia secara negatif dengan nilai kerugian berkisar 1.0 miliar USD.

Dampak perubahan iklim yang semakin sulit di kendalikan memicu pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia sekaligus berkontribusi kepada penurunan emisi secara global. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% secara unilateral dan penambahan 14 % dengan bantuan internasional dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7% pada akhir tahun 2020.

Mengacu pada hal ini pembangunan di Indonesia untuk mengadopsi prinsip pembangunan ekonomi hijau dengan inisiasi awal yaitu merencanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bertujuan mengurangi laju pemanasan global yang berdampak buruk terhadap lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan dengan prinsip ekonomi hijau merupakan agenda besar yang sedang dituju oleh pemerintah Indonesia, pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sekaligus menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam (UNEP; *United Nations Environment Programme*).

Enam kabupaten di Indonesia yaitu; Jayapura, Jayawijaya, Merauke; Musi Banyuasin, Banyuasin dan Musi Rawas melalui program LAMA-I (Locally Appropriate Mitigation Actions In Indonesia) telah melalui serangkaian penguatan kapasitas baik teknis maupun kelembagaan untuk dapat menyusun rencana aksi mitigasi berbasis lahan yang dapat menjadi masukan untuk perencanaan strategi pembangunan rendah emisi yang sesuai dengan konteks lokal dan berpotensi untuk di implementasikan di masing-masing kabupaten.

Salah satu pencapaian yang penting untuk disampaikan kepada para pihak terkait pembangunan sektor berbasis lahan dan masyarakat pada umumnya adalah bahwa ke-enam Pokja tersebut telah berhasil mengidentifikasi rencana aksi mitigasi yang dapat di implementasikan di kabupaten masing-masing. Pembelajaran yang didapatkan dalam proses penyusunan rencana aksi mitigasi ini tak kalah pentingnya untuk disampaikan kepada khalayak luas.

Selain bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menyusun



photo: Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre

The impact of climate change that recently has been become difficult to control has triggered the Indonesian government to initiate green economic development in Indonesia which can contribute to global emission reductions. The Indonesian government is committed to reduce the nation's emissions of greenhouse gases by 26% unilaterally and by an additional 14% with international support and improving economic growth by 7% by the end of 2020.

With reference to that goal, development in Indonesia has adopted the principle of green economic development which first requires planning mitigation actions and adapting to climate change in order to reduce the rate of global warming which is negatively affecting the environment and community welfare.

The development concept adopting green economic principles is a major agenda item of the Indonesian government—involving economic development which enables improvement in welfare and social justice as well as eliminating the negative impact of economic growth on the environment and the scarcity of natural resources (UNEP; *United Nations Environment Programme*).

Six districts in Indonesia: Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Musi Banyuasin, Banyuasin and Musi Rawas have been involved in capacity building both technically and institutionally through the programs of LAMA-I (Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia) in order to be able to formulate land-based mitigation action plans that can guide low-emissions strategy planning that is locally appropriate and has the potential to be implemented in each district.



rencana pembangunan rendah emisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembelajaran ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah di kabupaten dan provinsi sekaligus meningkatkan potensi replikasi dan peningkatan (*scaling-up*).

Tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin dan Musi Rawas menyampaikan pencapaian sekaligus pembelajaran yang di dapatkan di masing-masing kabupaten pada kegiatan Lokakarya Provinsi dengan tema “Merangkai Inspirasi Pembangunan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Selatan”. Lokakarya yang di selenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Program LAMA-I. Lokakarya Provinsi ini sebagai salah satu upaya untuk melibatkan berbagai pihak terkait untuk pembangunan ekonomi hijau di provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan lokakarya provinsi Sumatera Selatan di awali dengan memaparkan catatan penting dalam proses implementasi program LAMA-I di Sumatera Selatan. Dr Suyanto selaku Project Leader program LAMA-I menyampaikan bahwa Pemerintah daerah tiga lokasi program LAMA-I sangat mendukung implementasi program LAMA-I sekaligus mendukung seluruh proses kegiatan dalam konteks pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Pokja di tiga

One of the notable achievements to be presented to all parties regarding the development which is based on land and community sectors in general is that those six working groups (Pokja) have been able to identify mitigation action plans which could be implemented in each district. The lesson learned from the process of formulating mitigation action plans is important and should be widely shared with the public.

The lesson involves not only developing awareness and understanding on the importance of formulating a low-emissions development plan which can improve the community's quality life, but also providing guidance for the district and provincial government as well as raising the potential to replicate and scale up.

Three districts in South Sumatera Province have presented both on both the achievements and acquisitions gained at a Provincial Workshop themed “Intertwining Green Economic Development Inspiration in South Sumatera Province”. The workshop was organized by the Regional Development Planning Agency of South Sumatera Province (Bappeda South Sumatera Province) in cooperation with LAMA-I. It was intended to be one of the efforts to engage all related parties in green economic development in South Sumatera Province.

kabupaten telah berhasil mengidentifikasi rencana aksi mitigasi yang dapat dilaksanakan di kabupaten masing-masing. Proses integrasi rencana aksi mitigasi ke dalam rencana pembangunan daerah merupakan tantangan baru bagi Pokja dan Pemerintah daerah.

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Ir. Lukita Riyati, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan bahwa 'Program LAMA-I di Sumatera Selatan telah membantu pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan baik dilingkungan provinsi Sumatera Selatan dan di kabupaten khususnya dalam tata kelola hutan dan lahan guna mendukung rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) di Provinsi Sumatera Selatan. Program LAMA-I telah diupayakan untuk disinergikan dan dipadukan dengan berbagai aktivitas yang berada di Sumatera Selatan dengan proses pengarusutamaan rencana aksi mitigasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah'.

Prof Dr Rizaldi Boer dari CCROM IPB menyampaikan bahwa 'pembangunan yang semakin meningkat menurunkan kondisi lingkungan sehingga menaikkan potensi bencana ekstim yang dapat

The South Sumatera workshop activity started with the presentation of the project progress during the implementation of LAMA-I program in South Sumatera. The Project Leader of LAMA-I program, Dr. Suyanto, reported that the three regional governments were very supportive toward the implementation of LAMA-I program as well of all the activity processes which were in line with the sustainable green economic development context. Working groups in the three districts managed to identify mitigation action plans which were implementable in each district. The process of integrating the mitigation action plans into the regional development plan is a new challenge for both the working groups and local government.

The Chairman of the Regional Environmental Agency, Ir. Lukita Riyati, M.Si, spoke on behalf of the South Sumatera Regional Government and in her speech said that "LAMA-I programs in South Sumatera had helped the government to improve the capacity of officials and institutions at both the provincial and district levels, especially in terms of land and forest management in order to support the regional mitigation action plan in reducing the greenhouse emissions (RAD-GRK) in South Sumatera Province. The



mempengaruhi perekonomian di Indonesia secara negatif. Penanganan masalah perubahan iklim harus dilakukan baik melalui mitigasi dan adaptasi. Pelaksanaan kedua upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi'

Sesi diskusi membahas berbagai isu yang erat kaitannya dengan isu perubahan iklim juga proses mitigasi dan adaptasi yang sudah berjalan sekaligus membahas mengenai kebijakan nasional yang baru saja di keluarkan yaitu UU no. 23 tahun 2014 mengenai pembagian peran antara pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing Pokja di tiga kabupaten berkesempatan untuk turut dalam diskusi dan memaparkan pencapaian masing-masing kabupaten.

Perwakilan Pokja dari Kabupaten Banyuasin memaparkan bahwa Kabupaten Banyuasin telah mengidentifikasi 15 (lima belas) aksi mitigasi. Terdapat empat aksi fokus yang kemungkinan besar dapat dilaksanakan, dengan strategi upaya implementasi dengan melakukan pemetaan kelembagaan, analisis kelembagaan dan *tagging* aksi mitigasi ke dalam rencana kerja pembangunan daerah.

Kabupaten Musi Banyuasin telah merumuskan 13 aksi mitigasi yang apabila seluruh aksi mitigasi dapat dilaksanakan dapat menurunkan emisi sebesar 13% dengan fokus kegiatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan, KPHP Meranti dan unit penggunaan lahan lainnya. Kabupaten Musi Rawas telah berhasil mengidentifikasi 13 aksi mitigasi dan dapat terlaksana maka penurunan emisi 82.13%. Dari 13 aksi mitigasi diprioritaskan 5 aksi mitigasi yang berkontribusi 55% dalam menurunkan emisi.

Proses pengarusutamaan skenario aksi mitigasi kedalam rencana pembangunan kabupaten menjadi proses selanjutnya yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait. Melalui program LAMA-I yang mengedepankan proses perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, integratif dan didasari oleh data dan informasi yang shahih dapat menunjang terwujudnya pembangunan yang rendah emisi di provinsi Sumatera Selatan. Pokja dan pemerintah daerah pun harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan implementasi dari rencana aksi mitigasi yang telah disusun.

Sebagai upaya potensi replikasi program LAMA-I, kegiatan lokakarya provinsi Sumatera Selatan ini juga turut mengundang perwakilan pemerintah dari kabupaten di luar lokasi program LAMA-I. Perwakilan dari kabupaten Musi Rawas utara (Muratara)

LAMA-I program has been enforced to be synergistic and in step with various activities in South Sumatera by concentrating on the process to tag the mitigation action plans into the regional development plan document."

Prof. Dr. Rizaldi Boer of CCROM IPB shared his view that "increasing development has impacted on the environmental decline, causing the escalation of the potential for extreme disasters which negatively affect the Indonesia economy. The treatment of climate change problems must occur both through mitigation and adaptation. Both must be integrated".

The discussion session addressing various issues, which were closely related to climate change as well as running the mitigation and adaptation processes, also explored the newly released national policy, UU No. 23 year 2014, regarding distribution roles among central, provincial and district government. Each working group in the three districts was given the opportunity to participate in the discussion to present their local achievements.

Representatives of the working group from Banyuasin district in their presentation reported that the district was able to identify 15 mitigation actions, with 4 being focus actions which were most probably enforceable by an implementation strategy using institutional mapping, institutional analysis and mitigation action tagging into the regional development work plan.

Musi Banyuasin district had formulated 13 mitigation actions, which when implemented could reduce emissions by 13% by focusing activities in the Forest Production Management Unit in Lalan, Meranti and other land utilization units. The district successfully identified 13 mitigation actions, which when implemented could reduce emissions by 82.13%. Of the 13 mitigation actions, 5 actions which constitute 55% of emission reductions were being prioritized.

The process of tagging the mitigation action scenario into each district development plan is a further process which is the responsibility of all related parties. The realization of low-emissions development in South Sumatera Province can be achieved through the support of LAMA-I programs which concentrate on the regional development planning process that is inclusive, integrative and based on valid data and information. Both the working group and local government must have a high commitment

mengungkapkan bahwa kabupaten Muratara telah menyusun rencana strategis (Renstra) walaupun belum terlalu spesifik dengan topik pembangunan rendah emisi namun tujuan yang diharapkan sudah selaras dengan tujuan program LAMA-I. Hal ini tertuang didalam salah satu visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Kabupaten Muratara yaitu mewujudkan sumber daya alam yang berkelanjutan, ramah lingkungan, meningkatkan kawasan lindung dan pemanfaatan ruang sesuai dengan manfaatnya. Kabupaten Ogan Kumering Ulu Timur (Oku Timur) juga menyatakan bahwa rencana aksi mitigasi ini akan menjadi bahan masukan dalam proses penyusunan RPJMD tahun 2015.

Perwakilan dari Pemerintah Pusat Dr Medrilzam dari Kementerian PPN Bappenas mengungkapkan bahwa 'hal yang harus dipertimbangkan matang-matang dalam proses pembangunan, diawali dengan pembangunan manusianya dulu. Pembangunan yang bertujuan untuk menurunkan emisi dengan tidak memberikan dampak kerusakan lingkungan penting untuk dilakukan, namun kesejahteraan masyarakat juga sama pentingnya. Maka pembangunan rendah emisi tetap harus mempertahankan laju ekonomi'.

Implikasi UU no. 23 tahun 2014 dapat menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi yang dapat memberikan hasil yang positif salah satunya adalah memberikan dukungungan kepada kabupaten. Seiring dengan adanya program LAMA-I di tiga kabupaten percontohan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berharap agar seluruh kabupaten di Sumatera Selatan lainnya dapat memiliki dokumen perencanaan rendah emisi. Dukungan dari berbagai pihak tentunya diharapkan untuk menunjang proses inisiatif pembangunan rendah emisi di kabupaten lain.

Pokja berharap ke depan nya bahwa dengan peningkatan kapasitas baik secara teknis maupun penelenggaraan, Program LAMA-I bisa menjadi program prioritas yang dapat menjadi salah satu faktor penunjang agar aksi mitigasi dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Dukungan pemerintah provinsi dan nasional juga sangat penting agar inisiatif pembangunan rendah emisi melalui Pokja ini dapat terus berkelanjutan.

*Text by: Yessi Dewi Agustina

to the practical implementation of the developed mitigation action plans.

The workshop also invited the representatives of local government from outside the LAMA-I program location to develop the potential to replicate the program. The representative from North Musi Rawas district (Muratara district) disclosed the strategic plans (Renstra) drafted by the district, although they are not specifically related to low-emissions development topics yet, but the expected goals are in line with LAMA-I programs. One document contained the vision and mission of the Short-term Development Plan of Muratara district, which is to manifest sustainable natural resources, to be environmentally friendly, to improve protected areas and the utilization of space according to its function. East Ogan Kumering Ulu district also stated that the mitigation action plans will be a reference point in the process of developing its 2015 RPJMD.

The representative of Central Government, Dr. Medrilzam from the Ministry of National Development Planning, said that "One thing that should be firstly and carefully considered in the development process is the development of its human resources. Development which aims to lower emission by not causing environmental damage is as important as the welfare of the society. Thus, the low-emissions development still has to maintain the economic rate."

The implication of UU No. 23 year 2014 can be a beneficial challenge for provincial government in terms of providing support to the district government. Along with the LAMA-I programs in the three pilot districts, Bappeda of South Sumatera Province expects all districts in South Sumatera to draft low-emission development documents. Support from various parties is expected to bolster the initiation process of low-emissions development in other districts.

The working groups hope that by improvement in both technical and institutional capacities, the LAMA-I Program can be a priority program which is one of the supporting factors for the mitigation actions to be integrated into the regional development plan in the future. Provincial and central government support is also essential to maintain the sustainability of the low-emissions development initiatives through the working groups.

*Text by: Yessi Dewi Agustina

Project Advisory Committee (PAC) Meeting: Peluang dan Tantangan Mewujudkan Pembangunan Hijau di Indonesia

Project Advisory Committee (PAC) Meeting: Opportunity and Challenge Towards Green Development in Indonesia

Program *Locally Appropriate Mitigations Action in Indonesia (LAMA-I)* bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menyusun perencanaan penggunaan lahan menuju pembangunan yang rendah Emisi. Secara umum program LAMA-I berupaya untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor berbasis lahan sekaligus tetap menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan yang rendah emisi sebagai bagian penting dalam rencana aksi mitigasi nasional

Program LAMA-I didukung pendanaan oleh pemerintah Denmark melalui Danish International Development Agency, dan dilaksanakan oleh World Agroforestry Center (ICRAF) bersama GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dan CCROM (Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and the Pacific-IPB). Pelaksanaan program LAMA-I tidak terlepas dari arahan tim penasihat proyek (*Project Advisory Committee*) yang di pimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN-Bappenas) dan *Environmental Support Programme Phase 3* sebagai perwakilan dari pemerintah Denmark. Anggota tim penasihat ini terdiri Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air di Bappenas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan kebijakan di Kementerian Kehutanan, *Royal Danish Embassy* dan DANIDA.

Memasuki tahun ke tiga pelaksanaan program (LAMA-I), sejumlah pencapaian sekaligus pembelajaran telah didapatkan. Pencapaian pelaksanaan Program LAMA-I ditandai dengan



photo: Sadewa, Yessi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre

The Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) program is aimed at supporting the Indonesian government in developing plans for land utilization which lead to low-emission development. LAMA-I programs are generally set up to strengthen the capacity of local government in developing a greenhouse emission reduction strategy for the land-based sector as well as to ensure a sustainable, economic rate through a low-emissions policy, which is an essential part of the national mitigation action plans.

The LAMA-I program is funded by the Danish government through the Danish International Development Agency and executed by the World Agroforestry Center (ICRAF) in cooperation with GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) and CCROM (Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and the Pacific – IPB). The implementation of the LAMA-I program cannot be separated from guidance

keberhasilan Kelompok Kerja (Pokja) di Enam Kabupaten lokasi LAMA-I yaitu Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Muli Banyuasin, Muli Rawas dan Banyuasin dalam mengidentifikasi rencana aksi mitigasi yang berpotensi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di kabupaten masing-masing.

Dalam upaya membahas perkembangan terbaru pelaksanaan program LAMA-I, menyepakati rencana kerja program LAMA-I di tahun ke tiga sekaligus menemukan solusi terbaik dari tantangan yang ada juga turut memanfaatkan potensi yang dapat menunjang keberhasilan program, pertemuan Project Advisory Committee diselenggarakan di Hotel Double Tree pada tanggal 18 Agustus 2015.

Pertemuan yang diselenggarakan sekali dalam satu tahun ini menjadi forum diskusi pembelajaran di antara para pelaksana program, sekaligus momentum untuk menerima arahan dan rekomendasi dari para penasihat program mengenai berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program sehingga nantinya dapat diperoleh suatu kesepakatan bersama juga persetujuan mengenai rencana kerja tahunan.

Pertemuan PAC diawali oleh pembukaan dan arahan dari Kementerian PPN/Bappenas oleh Dr Medrilzam yang menyampaikan penghargaan kepada program LAMA-I yang telah berkontribusi di dalam proses revisi penyusunan dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) DI 34 provinsi. Melalui metode LUMENS (*Land-Use Planning for Multiple Environmental Services*) yang telah di mandatkan sebagai metodologi yang digunakan dalam revisi RAD-GRK dari sektor berbasis lahan, tim LAMA-I mendukung proses pelatihan Business As Usual (BAU) baseline yang diselenggarakan oleh Sekretariat RAD-GRK dan terbagi dalam tiga putaran berdasarkan wilayah Indonesia yaitu: wilayah tengah, timur dan barat.

Senada dengan pernyataan Dr Medrilzam, perwakilan ESP3, Lars Moller juga turut menyampaikan apresiasinya terhadap prestasi yang telah dicapai program LAMA-I. Lars Moller mengungkapkan bahwa sebuah prestasi yang membanggakan bahwa metode LUMENS berhasil di adopsi oleh pemerintah Indonesia dalam penyusunan RAD-GRK. Ia merasa dengan keberhasilan yang telah dicapai selama implementasi program LAMA-I, ia merasa tidak ada kekhawatiran akan pelaksanaan program LAMA-I di tahun selanjutnya.

Program LAMA-I dalam pelaksanaannya terbagi atas empat komponen tugas, masing-masing mitra

by the Project Advisory Committee which is lead by the Ministry of National Development Planning for the Environmental Support Programme Phase 3, as the representative of the Danish government.

A number of achievements and knowledge-building activities have been accomplished as we enter the third year of LAMA-I program implementation. The achievements of the LAMA-I program implementation was marked by the success of Work Groups (Pokja) in six districts, where LAMA-I programs have been implemented in Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Muli Banyuasin, Muli Rawas and Banyuasin districts, by identifying mitigation action plans which have the potential to reduce greenhouse emissions in each district.

A Project Advisory Committee meeting was held at the Double Tree Hotel on August 18, 2015 in order to discuss the progress of the latest LAMA-I implementation program, to obtain agreement on the LAMA-I work plan program for the third year, to find the best solution for the upcoming challenges and to utilize the potential which supports the success of the program.

The meeting which is held once a year is a learning discussion forum for program implementers, as well as providing momentum for the orientation and recommendations from the program advisors regarding the potentials and challenges identified during the program implementation period, so that mutual agreement on and approval for the yearly work plan can be generated.

The PAC meeting began with the opening and instructions from the Ministry of National Development Planning which was represented by Dr. Medrilzam who granted awards to LAMA-I programs which had made contributions to the revision process of regional action plan documents regarding the reduction of greenhouse emissions (RAD-GRK) in 34 provinces. The award was in recognition of applying the LUMENS (Land-Use Planning for Multiple Environmental Service) method, which was appointed as the methodology used in the revised RAD-GRK for the land-based sector; the LAMA-I team supported the Business as Usual (BAU) baseline training process which was organized by the RAD-GRK Secretariat and divided into three rounds based on the Indonesian central, east and west territories.

The representative of ESP3, Lars Moller, in tune with Dr. Medrilzam's statement, also voiced his appreciation of the achievements gained by the

pelaksana program bertanggung jawab untuk melaksanakan peran sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati. CCROM selaku pelaksana komponen 1 dengan peran mendukung formulasi kebijakan dan proses untuk mengembangkan sistem “*nested*” yang berkelanjutan MRV, pengaturan Reference Emission Level (REL) untuk pembangunan rendah emisi dan jasa lingkungan lainnya, termasuk perlindungan dan kebocoran, dari sub-nasional untuk tingkat nasional.

Prof Rizaldi Boer menyampaikan perkembangan pelaksanaan komponen 1 bahwa LAMA-I telah melakukan kajian Sintesis dokumen RAD dan RAN GRK; LAMA-I juga telah melakukan proses pembelajaran, analisis gap dan identifikasi awal dokumen RAD dan RAD GRK; LAMA-I juga turut memperkuat hubungan antara sistem pemantauan dan evaluasi RAD-GRK dengan sistem pelaporan MRV nasional; LAMA-I juga telah melakukan kajian REL; dan menyusun strategi untuk menjamin keberlanjutan komitmen.

ICRAF selalu pelaksana komponen 2 berperan untuk mengembangkan, melakukan pengujian dan distribusi perangkat dan pendekatan terhadap lanskap berkelanjutan melalui proses perencanaan penggunaan lahan yang integratif, inklusif dan informasi dalam meningkatkan mata pencaharian sekaligus meningkatkan penyimpanan karbon, mempertahankan fungsi DAS. Andree Ekadinata menyampaikan bahwa LAMA-I telah mengembangkan metodologi LUMENS di enam kabupaten; tim LAMA-I juga telah melakukan proses pengumpulan data primer dan sekunder; dan melakukan kajian bersama dan uji coba perangkat LUMENS.

Komponen 3 merupakan peran dari GIZ untuk melakukan penguatan kapasitas kepada pemerintah lokal dan nasional untuk mampu merencanakan, memantau dan mengevaluasi RAD-GRK. Ade Cahyat menyampaikan bahwa tim LAMA-I berhasil membentuk Pokja di enam kabupaten lokasi LAMA-I; LAMA-I telah melakukan studi Capacity development need assessment (CDNA); dan LAMA-I juga telah melakukan penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan pada enam Pokja di lokasi program LAMA-I.

Komponen 4 yaitu komponen koordinasi dan manajemen proyek dibawah tanggung jawab ICRAF, Dr Suyanto menyampaikan bahwa kegiatan program dan keluarannya telah terkoordinasi dengan baik;

LAMA-I program. He considered it an outstanding achievement that the LUMENS method has been adopted by the Indonesian government in preparing RAD-GRK. He also added that there is no doubt regarding the implementation of the LAMA-I program in the next year because of that success.

The LAMA-I program is divided into four task components in its implementation, of which each program implementer's partner is responsible for the execution of their role in accordance with the agreed work plan. CCROM, the implementer of component 1, roles are to support the formulation of policy and the process to develop a sustainable MRV nested system and to prepare a Reference Emission Level (REL) for low-emissions development and other environmental services, including leakage protection from sub-national to national levels.

Prof. Rizaldi Boer reported the progress of component 1 implementation—LAMA-I has studied the synthesized documents of RAD and RAN-GRK; LAMA-I has gone through the process of learning, gap analyzing and initial identification of the RAD and RAD GRK documentation; LAMA-I has played its part in strengthening the relationship between the monitoring system and RAD-GRK evaluation with the national MRV reporting system. Furthermore, LAMA-I has completed an REL study and was preparing a strategy to ensure continuous commitment.

ICRAF roles as the implementer of component 2 are to develop, test and distribute tools and approaches on a sustainable landscape through the process of integrative, inclusive and informed land-use planning in order to improve livelihoods, increase carbon stock, preserve the natural biodiversity, as well as to improve the function of DAS. Andree Ekadinata reported that LAMA-I has developed the LUMENS methodology in six districts; LAMA-I also has collected primary and secondary data; and completed a study and test-driven LUMENS devices.

GIZ undertakes the roles of component 3, which are strengthening the capacity of local and national government to be able to plan, monitor and evaluate RAD-GRK. Ade Cahyat submitted that the LAMA-I team has succeeded in forming a Work Group (Pokja) in six locations of LAMA-I; LAMA-I has studied Capacity Development Need Assessment (CDNA); and LAMA-I has strengthened the technical and institutional capacity in the six Work Groups in the LAMA-I program locations.

akuntabilitas kegiatan sudah terpenuhi khususnya kepada donor; dan visibilitas program LAMA-I meningkat dengan berbagai materi publikasi yang di produksi dan jumlah media yang meliput dan memuat kegiatan LAMA-I

Selain laporan kemajuan yang disampaikan dari masing-masing komponen, mitra pelaksana juga menyampaikan beberapa tantangan dalam pelaksanaan program LAMA-I di tahun mendatang, diantaranya yaitu terbitnya UU no 23. 2014 mengenai pembagian wewenang antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, LAMA-I harus mampu melakukan penyesuaian, karena beberapa peran dan wewenang yang awalnya ada di level pemerintah kabupaten menjadi wewenang pemerintah Provinsi. Selain itu merumuskan *exit strategy* yang tepat menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk memastikan keberlanjutan pengetahuan juga kelembagaan Pokja.

Beberapa rencana tindak lanjut yang turut disepakati adalah dengan mempertimbangkan implikasi pelaksanaan UU no 23 tahun 2014, tim LAMA-I bersepakat bahwa akan memberikan dukungannya kepada pemerintah provinsi, namun pemerintah kabupaten akan tetap menjadi prioritas, selain itu disepakati bahwa akan ada upaya untuk melakukan pertemuan tematik di antara kementerian dan mitra pembangunan terkait untuk dapat merumuskan mekanisme untuk menghubungkan proses RAD dan RAN-GRK pada level pemerintahan yang berbeda.

Membangun *Expert Network* menjadi salah satu upaya strategi untuk memastikan keberlanjutan pengetahuan yang telah dimiliki oleh kabupaten. Upaya mengintegrasikan kelembagaan Pokja ke dalam instansi yang ada di dalam lingkup pemerintahan adalah salah satu upaya *exit strategi* untuk memastikan bahwa Pokja tetap berjalan walaupun program LAMA-I berakhir.

Masing-masing mitra pelaksana pun mengajukan rencana kerja yang akan di laksanakan di tahun ketiga. Perwakilan Bappenas maupun ESP-3 sama-sama bersepakat bahwa LAMA-I dapat terus melanjutkan rencana kerja di tahun ketiga. Lars Moller kembali mengingatkan bahwa sebuah program yang terencana dengan baik dapat dilihat dari indikator penggunaan anggaran yang terlokasikan dengan tepat dan baik, sehingga di akhir program, sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan seluruhnya dengan baik.

*Text by: Yessi Dewi Agustina

Component 4 is the coordination and project management component under the responsibility of ICRAF. Dr. Suyanto in his report stated that the program activity and its results have been well coordinated; the accountability of the activity has been fulfilled, especially to the donors; and the LAMA-I program visibility has been increased by various publications that were produced and the number of media outlets that have covered and reported on LAMA-I activity.

The implementer's partners not only reported on the progress of the program in each component, but also on the challenges facing the implementation of LAMA-I in the coming year. The enforcement of UU No. 23 year 2014 regarding the role distributions among central, provincial and district government is one of the challenges. LAMA-I must be able to adjust somewhat due to legislative changes, because some roles that were under the responsibility of district government will be replaced by the provincial government. Furthermore, the formulation of an exit strategy becomes the responsibility of all parties to ensure the sustainability of knowledge as well as the institutional aspects of Pokja.

Some settling of the follow-up plans has occurred after considering the implications of the enforcement of Law No. 23 Year 2014 as the LAMA-I team has agreed to give their support to provincial government; however the district government is still their priority. Furthermore, there will be an attempt to set a thematic meeting between the Ministry and related development partners to formulate the mechanism to connect the RAD and RAN-GRK processes at the different government levels.

The building of an Expert Network has become one of the strategies to ensure the sustainability of knowledge that was gained by the districts. An attempt to integrate the institutional aspect of Pokja into existing institutions in the government is one of the exit strategies to ensure that Pokja will keep running when the LAMA-I program finishes.

Each implementer's partner proposed work plans which will be undertaken in the third year. Both representatives from Bapenas and ESP-3 agreed that LAMA-I can continue its work plans in the third year. Lars Moller reminded everyone that the budget of a well-planned program can be viewed as an indicator when it is allocated appropriately until the end of the program and the existing resources can then be well-utilized as a whole.

*Text by: Yessi Dewi Agustina

Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penyusunan aksi mitigasi pada tingkat lokal; Catatan proses peningkatan kapasitas provinsi dalam revisi RAD GRK tahun 2015.

Empowering local stakeholders in the compilation of local mitigation actions: Learning note on provincial-level capacity building in the 2015 RAD-GRK revision

Sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan komitmen upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 dan pelaksanaan amanah Peraturan Presiden No 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) serta mengoptimalkan peran RAD GRK provinsi maka pada tahun 2015 ini, Pemerintah Indonesia dibawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN-Bappenas telah menginisiasi proses kaji ulang RAN/RAD GRK.

Proses kaji ulang RAN/RAD GRK dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. Dengan perkembangan di dunia internasional, melalui proses kaji ulang RAN/RAD GRK, Indonesia diharapkan mampu melakukan telaah dampak skenario kebijakan terintegrasi antar sektor untuk penurunan emisi pasca 2020. Pada tingkat nasional kaji ulang terhadap RAN-GRK dilakukan untuk menyesuaikan

In keeping with emission reduction commitments, the Indonesian government has initiated the RAN/RAD-GRK revision process. This initiative is based on a number of considerations: the government initiative to reduce greenhouse gas emissions by 2020, the undertaking of Presidential Decree no. 61, 2011, regarding the National Action Plan to Reduce Greenhouse Gases (RAN-GRK), and to optimize the role of the Regional Action Plan to Reduce Greenhouse Gases (RAD-GRK) at the provincial level in 2015.

The RAN/RAD-GRK revision is to take into consideration the dynamic nature of national and international relations; with developments in the international context, the revision process is expected to evaluate the impact of integrated emission reduction policy scenarios between sectors post 2020. At the national level, the main purpose of the



photo: Yessi Dewi Agustina, Centre for World Agroforestry



photo: Yessi Dewi Agustina, Centre for World Agroforestry

rencana aksi mitigasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur program-program kementerian/ lembaga.

Proses kaji ulang ini juga dilakukan dalam upaya peningkatan sinergi pemangku kebijakan multi-pihak dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Bagi pemerintah daerah proses kaji ulang RAD GRK penting untuk dilaksanakan untuk dapat meningkatkan skala prioritas dalam penanganan isu perubahan iklim dengan mengupayakan RAD-GRK untuk dapat di integrasikan kedalam rencana pembangunan daerah. Proses kaji ulang RAN/RAD GRK meliputi proses kaji ulang terhadap angka-angka dan baseline yang terdiri dari data, metode perhitungan, metode proyeksi dan perangkat (*tools*) yang digunakan.

Sebagai upaya awal dalam kaji ulang / revisi RAD GRK, Bappenas telah meluncurkan kegiatan berupa pelatihan penyusunan *Business as usual* (BAU) *baseline* untuk 34 Provinsi, yang diselenggarakan dibawah Koordinasi Sekretariat RAN-GRK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/ Bappenas bersama kementerian dan lembaga terkait pembangunan, dalam upaya penguatan dan peningkatan kapasitas kelompok kerja (POKJA RAD-GRK).

Banyak unsur kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses ini, dimana World Agroforestry Center (ICRAF) mendapat kesempatan untuk membantu proses tersebut khususnya dalam peningkatan kapasitas provinsi dalam penggunaan metodologi penyusunan *baseline* dan aksi mitigasi dari sektor berbasis lahan. ICRAF memperkenalkan LUMENS *Land-use Planning for Multiple Environmental Services* (LUMENS) sebagai alat bantu yang dapat membantu dalam proses penyusunan *baseline* dan aksi mitigasi tersebut. LUMENS merupakan penyempurnaan dari LUWES yang dapat menghitung dampak dari proses pembangunan terhadap cadangan karbon dampaknya terhadap aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta berkurangnya fungsi jasa lingkungan dari suatu wilayah. LUMENS merupakan kelanjutan dari *Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies* (LUWES) yang sebelumnya digunakan dalam penyusunan RAD-GRK pada tahun 2011 dimana pada waktu itu banyak mendapatkan *feedback* yang diminta oleh provinsi terkait dengan kemudahan dalam penggunaan data dan format *output*-nya.



photo: Yessi Dewi Agustina, Anizka Mufida/World Agroforestry Centre

revision initiative is to align the mitigation action plan with the Midterm National Development Plan (RPJMN) for 2015-2019, while adjusting to the changes in nomenclature of various ministries and institutions under the new cabinet.

It is hoped that the revision process will develop synergy between the various multi-stakeholders in order to reach the targeted greenhouse gas emission reduction. For local governments, the RAD-GRK revision process is important to gain context regarding the relative priorities of the various climate change issues, and to assimilate this information into local development plans. The RAN/RAD GRK revision process will evaluate the various numbers and baselines including data, calculation methods, projection methods, and tools.

As a preliminary effort, Bappenas has distributed an activity containing Business as Usual (BAU) baseline calculation training for 34 provinces, organized in collaboration with the RAN-GRK secretariat, the Ministry of National Development Planning, and other relevant ministries and institutions. This preliminary effort is hoped to strengthen and build the capacity of RAD-GRK work groups.

LUMENS merupakan sebuah kerangka kerja dan alat bantu perencanaan penggunaan lahan yang inklusif dan integratif berbasis data serta informasi yang shahih. LUMENS mendorong dan memperkokoh kapasitas pemangku kepentingan dalam melakukan negosiasi akan penggunaan lahan dalam sebuah bentang lahan. LUMENS juga membantu para pemangku kepentingan untuk mengembangkan unit perencanaan penggunaan lahan yang baik melalui kuantifikasi jasa lingkungan, analisa proses *trade-off* (tarik ulur) antara pendapatan masyarakat, perekonomian daerah dan keberlanjutan berbagai jasa lingkungan serta simulasi skenario perubahan penggunaan lahan berdasarkan faktor pemicu yang sesuai dengan konteks lokal.

Skenario aksi mitigasi yang di hasilkan diharapkan menjadi masukan kepada pengambil kebijakan terkait pembangunan untuk dapat melakukan pembangunan hijau yang mempertimbangkan aspek lingkungan seperti keanekaragaman hayati dan fungsi jasa lingkungan dan kondisi pemungkin lainnya yang dapat memungkinkan di implementasikan nya skenario aksi mitigasi yang telah disusun.

Kegiatan peningkatan kapasitas provinsi melalui pelatihan penyusunan BAU baseline yang di selenggarakan dalam tiga putaran ini awali dengan melatih peserta untuk dapat membuat dan merekonsiliasi unit-unit perencanaan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah masing-masing. Lalu peserta di latih untuk dapat mengukur perubahan tutupan lahan yang terjadi di daerah masing-masing. Dilanjutkan dengan menghitung nilai Jasa Lingkungan seperti penghitungan cadangan karbon. Dari hasil penghitungan cadangan karbon tersebut, peserta kemudian dapat menyusun skenario aksi mitigasi penurunan emisi yang tepat untuk masing-masing daerah.

Dr. Medril Dzam dari Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air Kementerian PPN/ Bappenas mengungkapkan "LUMENS kembali di mandatkan sebagai metodologi yang digunakan dalam proses kaji ulang RAD-GRK karena pemerintah provinsi telah mengenal metodologi LUWES sebelumnya, sehingga akan lebih memudahkan untuk proses pelatihan, perangkat ini cukup mudah untuk digunakan dan menghasilkan data dan analisis yang cukup komprehensif yang dibutuhkan untuk dapat meninjau kembali dokumen RAD-GRK yang telah dibuat oleh masing-masing daerah, selain itu ICRAF juga memfasilitasi terjadinya proses pemahaman akan penggunaan LUMENS dengan

Apart from the various ministries and institutions involved in this effort, the World Agroforestry Center (ICRAF) is involved in capacity building at the provincial level, primarily in the introduction of baseline and mitigation assessment methods; the Land-use Planning for Multiple Environmental Services (LUMENS) method is a support system in the compilation of such baselines and mitigation actions. LUMENS is a further refinement of Land-use Planning for Low-emissions Development Strategies (LUWES), a method to calculate the impact of development on carbon reserves, economic, ecological, and sociocultural aspects, and the function of environmental services in a certain area. Refinements in LUMENS are a result of feedback regarding usability issues in LUWES from the 2011 RAD-GRK compilation process, in particular with regards to data usage.

LUMENS is a framework and support system for land-use planning that is inclusive, integrative, and informed. LUMENS is hoped to solidify the capacity of local stakeholders in negotiating land-uses in a certain area. LUMENS is also meant to support stakeholders develop competent land-use planning units through the quantification of environmental services, trade-off analysis between local population income, the local economy, the sustainability of various environmental services, and land-use conversion scenarios based on locally appropriate triggers.

The resultant mitigation action scenarios will be utilized to support decision-makers in formulating policies in the context of green development and specifically factors to consider include environmental aspects such as biodiversity, the functioning of environmental services, and other conditions enabling the implementation of the compiled mitigation action scenarios.

Capacity building at the provincial level was conducted through a series of three training workshops to introduce the concept of BAU baseline calculation. The series was opened by asking participants to develop and reconcile planning units according to the development goals of each of the participants' regions. Participants were then trained to measure changes in land-cover in their respective regions, followed by the calculation of the value of environmental services such as carbon stock. From these carbon stock estimations, participants were trained to develop appropriate mitigation action plan scenarios for their respective areas.

Dr Medril Dzam, speaking on behalf of the Forestry and Water Resource Conservation Ministry and

baik, sehingga LUMENS tidak menjadi *black box* yang sulit untuk digunakan”

Melalui kegiatan penguatan kapasitas untuk Pokja RAD GRK di 34 Provinsi, diharapkan dapat menjadi wadah berdiskusi antara pemerintah berbagai pihak dan menemukan solusi terbaik berbagai isu yang muncul dalam proses penyusunan RAD GRK. Berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mengenai data baik data aksi mitigasi maupun data-data lain yang diperlukan dalam proses penghitungan emisi GRK, adanya kendala mengenai pengelompokan aksi mitigasi sampai tingkat pemahaman personel Pokja RAD GRK yang berbeda karena faktor rotasi yang terus terjadi di struktur Pokja menjadi salah satu agenda pembahasan dalam kegiatan pelatihan penyusunan BAU Baseline.

Hampir seluruh peserta pelatihan Penyusunan *Baseline* dan Aksi Mitigasi ini di tiga regional yaitu ; regional Tengah, Barat dan Timur sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Beberapa peserta berpendapat bahwa LUMENS sangat memudahkan untuk mempercepat proses penghitungan emisi dan proses menentukan skenario terbaik untuk mengurangi emisi GRK berbasis lahan di daerah masing-masing. Penggunaan perangkat teknis LUMENS juga dirasakan lebih mudah dan sederhana untuk di terapkan tanpa mengurangi aspek keakuratan dan ketelitian dalam penghitungan. Ke-depannya diharapkan adanya penyempurnaan terhadap perangkat LUMENS untuk mengurangi terjadinya kendala teknis. Peserta juga mengharapkan penyempurnaan terhadap modul-modul LUMENS untuk memudahkan dalam menggunakan LUMENS, pelatihan lanjutan sangat diharapkan untuk membantu penguasaan metode LUMENS lebih baik lagi.

Setelah pelatihan BAU Baseline ini dilakukan di tiga regional, dari sektor Berbasis lahan hampir seluruh provinsi mampu memberikan laporan singkat sebagai rangkuman hasil analisis yang sudah dilakukan, hanya beberapa provinsi yang belum memberikan laporan karena ketidakhadiran dan konsentrasi aksi mitigasi terhadap sektor lain yang lebih dominan diprovinsinya . Rencana tindak lanjut dari pelatihan ini adalah finalisasi dari RAD GRK dari seluruh provinsi dengan dukungan semua pihak untuk terus memberikan asistensi baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan dikoordinasikan oleh sekretariat RAN-GRK.

*Text by: Yessi Dewi Agustina

Bappenas, stated that “LUMENS is the chosen methodology in the RAD-GRK review process owing to the fact that local governments are familiar with the preceding LUWES methodology, hence easing future transfer of knowledge. This method generates comprehensive data and analysis, which is paramount in the re-evaluation of the RAD-GRK document produced by the respective regions. Furthermore, due to the training and facilitation of ICRAF, LUMENS is well understood and is not an incomprehensible black box.”

It is hoped that the capacity building activities conducted for the RAD-GRK work groups in the 34 provinces will facilitate discussion between various local governments in discovering the optimal solution to various issues arising in the RAD-GRK compilation process. A number of challenges are in the agenda for BAU baseline calculation training; the lack of coordination between the provincial and district-level governments regarding data availability, the grouping of mitigation actions, and the large variability in capability between work group members due to frequent personnel rotation.

The majority of participants of the BAU baseline and mitigation action plan training workshop from the three regions attended enthusiastically. A few participants opined that LUMENS significantly simplified and accelerated the process of calculating emissions and choosing the best scenario to reduce greenhouse gas emissions in their respective regions, without adversely affecting the accuracy and detail of the calculations. Future refinements to the LUMENS tool are hoped to further simplify usability to reduce technical mishaps. In addition to these refinements, participants also requested supplementary training to master the LUMENS method.

Following the BAU baseline training in three regions, the majority of the participants were able to provide a succinct report of the land-based sector analysis conducted. A small number of provinces were unable to submit reports due to their absence from the proceedings or differing sector priorities in their respective provinces. Planned follow-ups to this training are the finalization of the RAD-GRKs of all provinces with the support of all relevant parties to provide assistance directly or indirectly, to be coordinated through the RAN-GRK secretariat.

*Text by: Yessi Dewi Agustina



Pola pemanfaatan lahan hukum adat: warisan budaya cerminan damai di Bumi Cenderawasih

Patterns of customary law land use: A cultural heritage of peace in Cendrawasih Land

Setiap suku di dunia mempunyai sejarahnya masing-masing, tak terkecuali suku yang ada di Papua, Indonesia. Bangsa asing yang pertama kali datang ke Papua adalah bangsa Portugis, yang kemudian menyebut daratan Papua dengan nama New Guinea. Seorang pelaut Spanyol, Ynigo Ortiz Retes menyebut Papua dengan nama *Neuva Guinea* (Guinea Baru) karena masyarakatnya mengingatkan pada penduduk pantai Guinea di benua Afrika. Sebutan lainnya adalah "Papua" yang pertama kali digunakan oleh pelaut Portugis Antonio d'Arbreu saat mengunjungi pantai Papua pada tahun 1551.

Kata "Papua" berasal dari kata Melayu "Pua-pua" yang berarti "keriting" (Stirling, 1943: 4). Sedangkan nama Irian yang dalam bahas Biak berarti "sinar matahari yang menghalau kabut di laut" pertama kali diusulkan oleh F. Kaisepo dalam konferensi Malino 1946. Papua memiliki lebih dari 300 suku dan jauh sebelum Indonesia merdeka atau sebelum pemerintah dan gereja memasuki Papua, setiap kelompok masyarakat sudah memiliki pola pemanfaatan lahan yang didasari pada hukum adat dari suku-suku yang bersangkutan. Contohnya di Kampung Yepase, Wambena dan Doromena.

Bagi masyarakat adat, dasar hukum adat adalah tata cara yang dibuat bukan untuk dilanggar sehingga tetap murni.

Terdapat beberapa zona pemanfaatan tradisional di kampung Yepase, Wambena dan doromena tersebut,

Every tribe in the world has its own history, including the extant tribes of Papua, Indonesia. The first foreigners to set foot in Papua were Portuguese, who later called the land Papua by the name "New Guinea". A Spanish sailor named Ynigo Ortiz Retes called Papua "Neuva Guinea" (New Guinea) because the people reminded him of the people of the Guinea Coast in Africa. The final name, "Papua", was first used by a Portuguese sailor named Antonio d'Arbreu when he visited the Papua coast in 1551.

"Papua" is derived from the Malay word "Pua-pua" which means curly (Stirling, 1943: 4). The name "Irian" which in the Biak language translates to "the sunlight that steers out of the mist in the sea" was coined by F. Kaisepo in the Malino conference of 1946. Papua has more than 300 tribes and each social group has its own land use patterns and management system. Long before the independence of Indonesia, institutions such as government and church entered Papua, for example in the villages of Yepase, Wambena and Doromena, which consist of several tribes and families.

The basis of customary law for a traditional society is a legal basis made to be unbroken and, thus, undiluted.

In these villages, a number of traditional utilization zones are defined: the Sena Zone (Primary Forest) forest that is rarely used by the community; the Sena Seke Zone (Secondary Forest) is a part of the primary forest

yaitu: Zona Sena (Hutan Primer) yang jarang terjamah masyarakat, Zona Sena Seke (Hutan Sekunder) bagian hutan primer yang telah dibuka menjadi lahan pertanian, kemudian dibiarkan/ ditinggalkan setelah panen sampai ditumbuhi oleh semak dan pohon-pohon kecil. Hutan ini biasanya dimanfaatkan sampai 15-20 tahun dan lalu dibiarkan sampai menjadi hutan tua kembali. Selanjutnya adalah Zona Emi (Lahan Pertanian) yang digunakan untuk bercocok tanam, Zona Pi Pau (Bentang lahan yang ditumbuhi/ ditanami oleh sagu), Zona To Emi (Tempat berkebun yang lama ditinggalkan, namun sebelum ditinggalkan area tersebut ditanami dengan kelapa atau tumbuhan keras lainnya. Terakhir adalah Zona Yo' (Area Pemukiman).

Selain mengenal sistem zonasi, masyarakat juga telah mengenal sistem perkebunan 'gilir balik' yaitu pemanfaatan lahan yang pada umumnya digunakan di pesisir pantai sebelah utara Kabupaten Jayapura dengan berwawasan agroforestry. Mereka memiliki kriteria-kriteria tertentu yang mengkombinasikan antara kesesuaian lahan dengan aspek penunjang kebutuhan yang tersedia. Kriteria tersebut antara lain tersedianya air bersih, kayu untuk membangun rumah, jarak untuk akses ke pantai dan transportasi yang memadai. Persyaratan lain yang juga penting adalah, status tanah. Jika tanah tersebut milik bersama (bebas) maka dapat dibangun, namun jika milik suku atau perorangan maka diperlukan adanya kesepakatan terlebih dulu.

Kampung (Yo) Yepase berada di bagian Utara Jayapura dengan luas 470,3 ha. Sumber mata pencaharian utama penduduk sebagai nelayan tradisional dan berkebun. Masyarakat Kampung Yepase dalam penataan dan pemanfaatan lahan sudah menerapkan sistem zonasi yang diajarkan secara turun temurun. Meskipun kondisi topografi Kampung Yepase yang secara umum berada di daerah yang berbukit dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, namun mereka tetap berkomitmen untuk mematuhi zonasi yang ada. Penduduk tetap menggunakan zona berkebun yang sudah disiapkan dengan harapan tidak berkebun di hutan primer atau *Sena*.

Meskipun Kampung Yepase memiliki hutan primer yang luas, namun mereka sangat menyadari pentingnya kelestarian hutan. Dengan terus mempertahankan dan melestarikan hutan maka sumber air, udara segar, dan bahan bangunan akan terus tersedia. Masyarakat menyadari bahwa air bersih berasal dari lingkungan yang terjaga dengan baik. Mereka juga memahami benar, lokasi Kampung Yepase yang berada di pegunungan rentan oleh longsor jika menebang pohon yang ada di pinggiran hutan. Selain berfungsi sebagai tanaman pangan sagu, pohon sagu yang ditanam di dekat mata air akan menjaga ketersediaan air pada saat musim kemarau. Bagi masyarakat, yang terpenting bukan hanya memanen hasil hutan tapi juga menjaga dan meningkatkan hasilnya. Inilah salah satu cara masyarakat

converted into farm land and subsequently abandoned after harvest time. This type forest is usually utilized for 15-20 years before abandonment, subsequently reverting back to old forest. The next zones are the Emi Zone (Agricultural Land) which is utilized for farming, the Pi Pau Zone (land that is overgrown or planted by sago), the To Emi Zone (a long abandoned agricultural land, but before it was abandoned, the area was planted with coconut trees or other hard-fruit vegetation), and lastly the Yo' Zone (Settlement Area).

Apart from an understanding of zone systems, the community has practiced the 'gilir balik' plantation system, an agroforestry-based land utilization system generally used on the north coast of Jayapura District. They also have certain criteria to judge the suitability of land and necessary supporting requirements. The requirements are the availability of clean water, wood and timber to build houses, and distance from the coast or other transportation infrastructure. Another important requirement is land status. If the land is owned by the community (free land) it is possible to develop it, but if it is owned by a tribe or individual, an agreement needs to be reached first.

Yepase village (Yo Yepase) is located in the northern part of Jayapura covering an area of 470.3 hectares. The livelihoods of the villagers are derived mainly from traditional fishing and farming. The zone system has been applied by the Yepase villagers in managing and utilizing the land, a tradition that has been passed down through the generations. They have committed to comply with the existing zones although the topographical condition of the village is generally hilly and population growth is increasing. The villagers still utilize the existing farming zones and are not planning to utilize the primary forest or *Sena*.

Although Yepase village has a huge primary forest area, the villagers are aware of the importance of forest sustainability. The availability of water resources, fresh air, and building materials is guaranteed while the forest is sustained. They realize that clean water comes from a well-maintained environment. They also understand that their village is situated in a hilly location, which is vulnerable to landslides if they cut down the existing trees on the outskirts of the forest. Besides serving as food crops, sago that is grown near a spring will maintain the availability of water during dry season. Harvesting the crops is not the only important thing for the community, but also maintaining and improving the crops. It is the villagers of Yepase's way to manage, maintain, and sustain nature using their local culture and wisdom.

Wambena Village (Yo Wambena) is located in northern Jayapura. The village covers an area of roughly 793.3 hectares. The village is situated on a steep slope at the foot of Doponsrlo mountain/Cycloop mountain. The

Kampung Yepase turut dalam mengelola, menjaga dan melestarikan alam dengan budaya dan kearifan lokalnya.

Kampung (Yo) Wambena berada di bagian utara Jayapura. Kampung Wambena memiliki luas 793,3 ha. Kondisi topografi Kampung Wambena berada pada kemiringan yang curam di kaki gunung Doponsro/ Cycloop. Sumber mata pencaharian masyarakatnya sebagai nelayan tradisional dan berkebun. Pola pemanfaatan lahan sebagian besar dataran tinggi/ pegunungan hingga bawah kaki Gunung Cycloop masih berupa hutan primer (*Sena*), sedangkan daerah aktifitas masyarakatnya termasuk ke jenis hutan sekunder (*Sena seke*). Pola ruang kebun masyarakat hanya di pinggiran jalan dan dekat dengan kampung. Kondisi *Sena* di Kampung Wambena masih terjaga ditandai dengan mudah ditemukannya berbagai jenis burung disana, salah satu yang terkenal adalah *bird of paradise* atau burung Cenderawasih. Namun saat ini yang menjadi masalah adalah adanya penebangan pohon di hutan Wambena yang dilakukan oleh warga dari kampung lain, sehingga mengancam kelestarian hutan dan ketersediaan air.

Kampung (Yo) Doromena terletak di Teluk Merah dan diapit oleh dua pegunungan, yaitu pegunungan Cycloop dan pegunungan Dafonsoro. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Jayapura. Bagian utara berbatasan langsung dengan samudera pasifik dan bagian selatan berbatasan dengan Kampung Kertosari Sabron. Bagian barat kampung berbatasan dengan Kampung Wambena serta bagian timur berbatasan dengan Kampung Yewena. Kampung dengan luas 680 km² ini sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan tradisional. Kondisi geografis kampung Doromena tidak berbeda jauh dengan Kampung Yepase dan Wambena. Kampung Doromena pada awalnya di sebut "DO DEMENA YO". Kampung doromena pada dasarnya secara adat mempunyai sebelas (11) Zona pemanfaatan lahan yang telah dibagi secara adat dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat kampung doromena. Namun pada tahun 1987 – 1994 Kampung Doromena pernah dilanda bencana alam yaitu banjir besar yang menyebabkan masyarakat memutuskan untuk tidak berkebun diatas ketinggian 500 m dari bibir pantai. Pada saat ini tata cara pemanfaatan masyarakat dibagi menjadi tiga (3) yaitu Pau(Dusun), Yo (Kampung), Sena (Hutan Primer). Dengan memanfaatkan lahan perkebunan tanaman jangka panjang atau tanaman kehutanan yang sudah ada, sehingga hutan primer yang termasuk dalam kawasan penyangga gunung Cyclops masih tetap terjaga hingga pada saat ini.

Filosofi Tanah bagi masyarakat suku wilayah adat Telpora yewena Yosus sering dimanifestasikan sebagai seorang Ibu yang memberikan susu. Susu diibaratkan sebagai seluruh kekayaan yang ada di bumi.

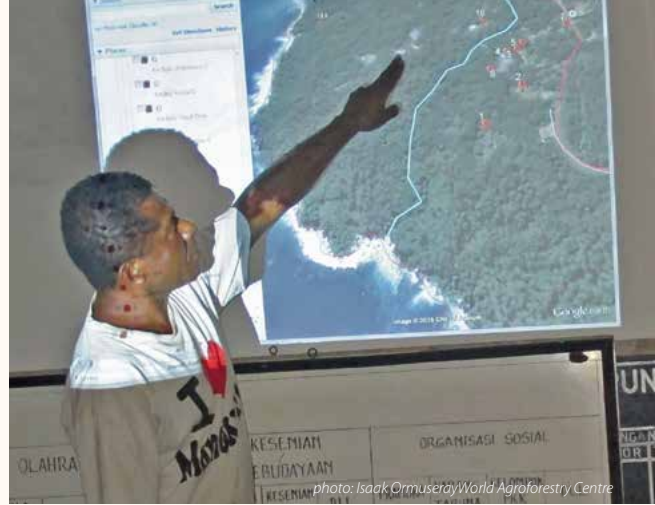


photo: Isaak Ormuseray/World Agroforestry Centre

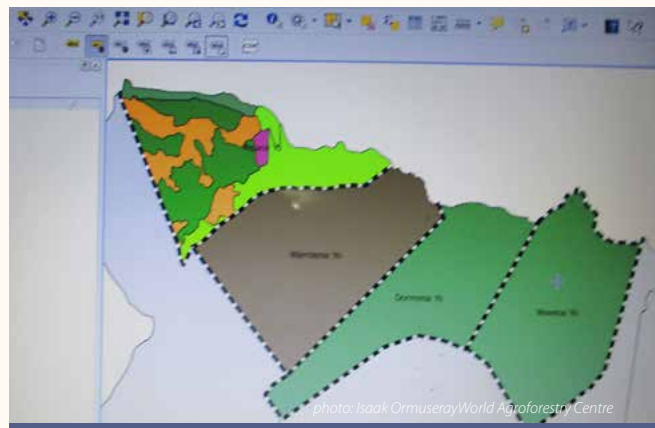


photo: Isaak Ormuseray/World Agroforestry Centre

livelihoods of the villagers of Wambena have traditionally been fishing and farming. The patterns of land use for Wambena villagers are: most of the area from the highlands to the foot of Cycloop mountain is primary forest (*Sena*), whereas the area for community activities is the secondary forest (*Sena seke*). Farming for the community is conducted only on the outskirts of roads and close to the village. The *Sena* of Wambena village is well maintained and characterized by its diversity of birds—the bird of paradise is one of the famous birds to be found here. Unfortunately, an increase in logging activities attributed to outsiders has become a threat to the sustainability of the forest and the availability of water resources.

Kampung (Yo) Doromena located on the Red Bay (Teluk Merah), between two mountains Cycloops and Doromena. The northern part border is the Jayapura district. The northern part is directly adjacent to the Pacific Ocean and the southern part of the village border is the Kertosari Sabron village. The western part of the village adjacent to the Wambena village and eastern parts border is the Yewena village. The Village area is approximately 680 km² and predominately working as farmers and traditional fishermen. Doromena village was originally called "DO Amendment HYO" before it was changed to be Doromena. Doromena village basically has eleven (11) land use zone based on indigenous customarily system and carried

Konsep kepercayaan tanah sebagai ibu dan adanya sistem pemanfaatan lahan di Papua jauh dari zaman leluhur, menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan tradisional masyarakat Papua mengacu kepada pemanfaatan alam secara berkelanjutan. Dimana ada pemanenan atau pemanfaatan alam, namun kelestariannya juga tetap terjaga. Selain percaya bahwa tanah merupakan 'ibu', masyarakat Papua juga percaya bahwa tanah merupakan sumber berkah dan kutukan. Bagi kebanyakan masyarakat adat, ketika berbicara masalah tanah, maka sebaiknya berhati-hati karena menurut mereka tanah merupakan sesuatu yang 'panas' atau sensitif. Jika salah berbicara dan ada pihak yang tersinggung dapat menimbulkan konflik bahkan berujung dengan peperangan.

Berkaitan dengan hak kepemilikan tanah, didalam hukum dan tatanan adat, pandangan masyarakat adat terhadap hak ulayat atau batas kampung, di ibaratkan sebagai sebuah rumah yaitu secara keseluruhan dikuasai oleh Ondoafi (kepala negara adat kampung), sedangkan kamar-kamar yang terdapat didalam rumah adalah batas hak kepemilikan tanah per kepala keluarga atau Marga tertentu. Sehingga untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, sangat diperlukan adanya satu peta kawasan dan penggunaan lahan yang disetujui dan dipercaya.

Konsep yang sama saat ini juga dilakukan oleh Program ParCiMon (*Participatory by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies*) yang didanai oleh Uni Eropa dan LAMA-I (*Locally-appropriate mitigation actions in Indonesia*) dengan dukungan pendanaan oleh pemerintah Denmark dan dilaksanakan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) bersama dengan Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific at Bogor Agricultural University (CCROM), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Universitas Brawijaya, dan Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya (YALI) dalam upaya mendukung kebijakan nasional untuk penurunan karbon sebesar 41% beserta peningkatan ekonomi sebesar 7%, dimana ekonomi masyarakat meningkat, namun kelestarian lingkungan juga tetap diperhatikan.

Melalui kegiatan ParCiMon dan LAMA-I diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman tersebut. Sehingga nantinya perencanaan dari pemerintah daerah bisa bersinergi dengan hukum adat yang berlaku dan pada akhirnya tercipta hubungan yang baik secara horizontal antara masyarakat maupun secara vertikal masyarakat dengan pemerintah, menuju sebuah pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di tanah Papua berdasarkan kearifan lokal yang kental dengan perdamaian.

text by: Isaak Ormuseray, Arizka Mufida, Yessi Dewi Agustina

out from generation to generation, by the villagers. But in the year 1987 - 1994 Natural Disaster hit Doromena which have led the community decided not to farm on the land above the altitude of 500m from the shoreline. At this time the pattern of land-use in Doromena Village are divided into three area; Pau (Hamlet), Yo (village), Sena (Primary Forest). By utilizing the long-term crop plantation or forest trees that already exist therefore the primary forests as part of the buffer zone on the Cyclops mountain are still remain until today.

Land for the Papuan is often manifested as a breast-feeding mother. Breast Milk is all the wealth on Earth.

The core belief that land is a mother, in tandem with the existence of a land use system in use through countless generations, is striking proof of the wisdom of traditional community values in Papuan relations to sustainable, natural utilization. Nature preservation is enforced on all land where crops are harvested or utilized. Besides believing that land is "a mother", Papuans also believe that land can be the source of both blessings and curses. The majority of the society is very cautious when it comes to talking about land, because it is considered to be a hot or sensitive topic; misunderstanding or offense may even result in war. Therefore, in order to accommodate the interests of all parties, it is necessary to have a reliable map of land that can be utilized.

The same concept has recently been applied by the ParCiMon (Participation by civil society in land-use planning for low-emissions development strategies) Programme which is funded by the European Union and LAMA-I (Locally-appropriate mitigation actions in Indonesia) with funding from the Danish government and executed by the World Agroforestry Centre (ICRAF) together with the Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific at Bogor Agricultural University (CCROM), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Brawijaya University, and the Foundation of Irian Jaya Living Environment (YALI) in order to support the national policy for carbon reduction by 41% and economic improvement by 7%. Environmental sustainability must be accounted for wherever the local economy is strong.

It is expected that through the activities of ParCiMon and LAMA-I, agreement can be reached. It will allow local government to plan accordingly to synergize with the applicable customary law and eventually create a good relationship both horizontally among communities and vertically between communities and local government for the sake of sustainable, green, economic development based on local wisdom and peace.

Text by: Isaak Ormuseray, Arizka Mufida, & Yessi Dewi Agustina

Optimalisasi peran multi-pihak: kunci sukses terwujudnya pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Merauke

The optimization of multi-party roles:
The key to success of green economy
development in Merauke district



Kelompok Kerja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (Pokja TIPRE) kabupaten Merauke berhasil mengidentifikasi enam aksi mitigasi yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) lebih dari 19% di kabupaten Merauke. Enam aksi mitigasi tersebut di sampaikan dalam kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di Hotel Swiss-bel Merauke tanggal 29 September 2015, dalam upaya untuk memperoleh masukan-masukan strategis dari para pemangku kepentingan yang lebih luas

Konsultasi Publik ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya upaya mitigasi yang di inisiasi oleh Pokja TIPRE, sehingga dapat terbentuk kesepahaman dan komitmen yang bermuara pada tercapainya partisipasi aktif dan dukungan peran multi-pihak yang lebih luas untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Merauke.

Pokja TIPRE berhasil mengidentifikasi 6 (enam) rencana aksi penurunan emisi setelah melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari penguatan kapasitas baik secara teknis maupun kelembagaan. Pokja TIPRE yang beranggotakan perwakilan unsur-unsur pemerintah daerah lintas sektoral, lembaga adat, masyarakat adat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta secara partisipatif menyusun strategi pembangunan rendah emisi yang mampu mengurangi tingkat emisi GRK dari penggunaan lahan.

Strategi pembangunan rendah emisi untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan ini merupakan hasil dari kajian penyusunan perencanaan pembangunan rendah emisi berbasis lahan yang berkelanjutan yang di lakukan oleh Pokja TIPRE dengan menggunakan metode LUMENS (*Land Use Planning for Low Emission Development strategy/ Land Use Planning for Multiple Environment Services*) yang di inisiasi oleh program ParCiMon (Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emission development strategies) dan program LAMA-I (*Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia*).

Aksi penurunan emisi yang telah disusun tersebut terbagi dalam dua kelompok besar yaitu; Kegiatan pencegahan penurunan cadangan carbon dan Kegiatan peningkatan cadangan karbon yang dilakukan baik didalam kawasan maupun diluar kawasan hutan. Secara garis besar ke enam kegiatan tersebut diperkirakan mampu mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca Merauke di masa yang akan datang.

The Low-emissions Development Technical Initiative Work Group (Pokja TIPRE) of Merauke district has successfully identified 6 mitigation actions which can lower greenhouse emissions (GRK) by more than 19% in that district. The six mitigation actions were presented at the Public Consultancy activity which was held in the Swiss-Bel Hotel Merauke on the 29th of December 2015, in order to obtain strategic input from officials who have a wider interest.

The Public Consultancy aimed to develop awareness on the importance of mitigation actions initiated by Pokja TIPRE; thus, a mutual understanding and commitment which was focused on the achievement of active participation and the support of wider parties to materialize green economic development in Merauke district could be developed.

Pokja TIPRE has identified 6 mitigation actions on emissions reduction through a set of activities which consists of the strengthening of capacity, both technically and institutionally. Pokja TIPRE consists of representatives from the inter-sectoral local government apparatus, customary institutions, customary society, religious institutions, non-governmental organizations and private parties who jointly have prepared low-emissions development strategies that can reduce the GRK emissions of land-use.

The low-emissions development strategies to support sustainable green economy development were the result of a study of sustainable, land-based, low-emission, development planning preparation done by Pokja TIPRE using the LUMENS (Land Use Planning for Low-Emissions Development Strategy/ Land Use Planning for Multiple Environment Service) method pioneered by the programs of ParCiMon (Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low-emission Development Strategy) and LAMA-I (Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia).

The emission reduction actions which were set out were divided into two major groups—the prevention of carbon stock reduction activity and the improvement of carbon stock activity—both inside and outside forest areas. The activities are expected to be able to reduce the greenhouse emissions in Merauke in the future.

Activities undertaken through the emission reduction action plan include: opening the primary forest and



photo: Y



essi Dewi Agustina/World Agroforestry Centre

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari rencana aksi penurunan emisi tersebut meliputi mengurangi pembukaan hutan primer dan mencegah pembukaan lahan dengan cara memabakar pada zona perkebunan; pengembangan agroforestri berbasis tanaman lokal unggulan pada lahan-lahan tidak termamfaatkan di zona hutan produksi; penanaman kembali hutan mangrove di areal yang dialokasikan sebagai hutan bakau; mencegah konversi hutan pada areal yang di alokasikan sebagai resapan air; mencegah konversi hutan pada areal yang dialokasikan sebagai cagar alam darat; meningkatkan cadangan karbon pada areal pertanian lahan basah dan lahan kering melalui sistem agroforestri.

Dr. Suyanto selaku pimpinan program ParCiMon menyatakan bahwa Kabupaten Merauke menjadi Kabupaten terakhir yang menyelenggarakan Konsultasi Publik di antara kabupaten lokasi program ParCiMon dan LAMA-I lainnya namun keberhasilan Pokja patut dibanggakan karena Pokja TIPRE tidak hanya mampu melakukan penyusunan dokumen strategi pembangunan rendah emisi di Kabupaten Merauke, Pokja TIPRE juga telah mampu melakukan analisa dengan menghitung nilai manfaat ekonomi dari setiap aksi yang telah dipilih untuk dapat di implementasikan.

Melalui upaya integrasi antara pembangunan rendah emisi dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, Kabupaten Merauke menjadi salah satu Kabupaten terdepan dalam upaya untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% melalui upaya mandiri dan 15%

preventing people from burning down the farming zone; developing local top plant-based agroforestry in the production forest zone; replanting mangrove forest in the area which is allocated for mangrove forest; preventing the conversion of forest in the water absorption area; preventing forest conversion in an area allocated for natural preservation; and improving carbon reserves in wet and dry farming areas using agroforestry systems.

Dr. Suyanto as the head of ParCiMon program stated that, "although Merauke district was the last among other districts where ParCiMon and LAMA-I programs were implemented, through the public consultancy process, the success of Pokja TIPRE deserves recognition because it was not only able to prepare low-emission development strategy documents in Merauke district, but was also able to analyze them by calculating the value of the economic benefits of every action which was chosen to be implemented'.

By integrating the attempts of low-emission development with regional economic growth, Merauke district has become one of the foremost districts to support the Indonesian government commitment to lower the emissions by 25% by their own efforts and by 15% with international assistance, and still manage to support efforts to boost the economic growth by 7%. The commitment of the Indonesian government was contained in the Presidential Regulation No. 61 year 2011 regarding the National Mitigation Actions in Lowering the Greenhouse Emissions (RAN-GRK) which covers all sectors that contribute to the production of greenhouse emissions.

The national action plan in reducing greenhouse emissions has been passed on to the regional level in the form of regional action plans to reduce greenhouse emissions (RAD-GRK). The development of RAD-GRK in Papua province is under the responsibility of the Regional Planning and Development Agency (Bappeda) in cooperation with the program for the Strategy and Action Plan for the Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation plus Conservation (SRAP REDD+) which is headed by the Forestry Unit and the Board of Natural Resource and Environment Management (BPSDLH). One of the initiatives of Merauke district in its attempt to lower GRK emissions in the district is the issuance of Regent Decree No. 411 year 2014 regarding the Establishment of Pokja TIPRE in Merauke District. A number of the elements in this activity aim to encourage the holders of interests to

melalui dukungan internasional dengan tetap mendukung upaya pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Komitmen pemerintah Indonesia tersebut di tuangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang mencakup semua sektor yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

Rencana aksi nasional penurunan gas emisi rumah kaca ini diturunkan ke level daerah ke dalam bentuk rencana aksi daerah penurunan gas emisi rumah kaca (RAD-GRK). Di Propinsi Papua, proses pembangunan RAD-GRK Papua berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama dengan program Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan plus Konservasi (SRAP REDD+) yang dipimpin oleh Dinas Kehutanan dan Badan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BPSDLH).

Salah satu bentuk inisiatif Kabupaten Merauke dalam upaya penurunan emisi GRK di Kabupaten Merauke adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Merauke nomor 411 tahun 2014 tentang Pembentukan Pokja TIPRE Kabupaten Merauke. Banyaknya unsur yang dilibatkan dalam kegiatan ini bertujuan agar semua pemangku kepentingan dapat terlibat aktif dalam perencanaan hingga pengendalian program.

Terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di tentukan oleh berbagai faktor. Pokja Teknis Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (TIPRE) kabupaten Merauke juga telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong sekaligus menghambat pembangunan ekonomi hijau di kabupaten Merauke. Kondisi pemungkin (enabling condition) merupakan suatu kondisi yang perlu dipersiapkan agar implementasi pembangunan ekonomi hijau dapat mencapai tujuan yang di harapkan. Kondisi pemungkin eksternal yang telah diidentifikasi Pokja TIPRE terdiri dari faktor kepastian wilayah kelola masyarakat adat; akselerasi implementasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan review perizinan pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Sementara kondisi pemungkin internal terdiri dari faktor kelembagaan RAD-GRK di daerah; instrumen MRV dan instrumen pendanaan.

Bupati Kabupaten Merauke yang turut hadir dalam kegiatan Konsultasi Publik sangat mendukung

be actively involved, starting from program planning through to management or controlling.

The materialization of sustainable green economy development is determined by several factors. TIPRE in Merauke district has managed to identify these factors which can be supportive as well as resistant to green economy development in Merauke. Enabling conditions need to be prepared so the implementation of green economy development can achieve its expected goals. External enabling conditions which have been identified by Pokja TIPRE



keberadaan Pokja TIPRE Merauke dan inisiatif pembangunan rendah emisi yang ingin diwujudkan di Kabupaten Merauke. Drs. Romanus Mbaraka, MT mengungkapkan bahwa 'Indonesia ingin maju, Merauke juga ingin maju, maka pembangunan perlu tetap dilakukan, dan pembangunan perlu ruang, namun hendaknya pemanfaatan ruang telah melalui sebuah kajian yang menyatakan bahwa lahan yang digunakan untuk sebuah pembangunan memang sudah tepat. Perencanaan pembangunan sangat penting dilakukan, karena berkaitan erat dengan pendapatan daerah, pemanfaatan ruang untuk investasi tentu saja harus sesuai dengan kebijakan pengendalian emisi karbon.

Dengan keberadaan Pokja TIPRE, Romanus juga mengharapkan masukan-masukan positif kepada pemerintah Kabupaten Merauke mengenai kebijakan dalam hal pengendalian ruang termasuk kebijakan pengendalian emisi karbon, agar kebutuhan peningkatan pembangunan dapat dilakukan lebih baik, sehingga tidak hanya mengedepankan pendapatan ekonomi daerah namun juga tetap memelihara dan meningkatkan fungsi jasa lingkungan. Kesemuanya harus dilakukan secara integratif, sistemik dan terpadu.

Peningkatan peran multipihak baik dari perencanaan kebijakan, pelaksana teknis kebijakan, pihak pemantau kebijakan tersebut sekaligus masyarakat dan pihak lain terkait pembangunan dapat menjadi pendorong keberhasilan pelaksanaan rencana aksi penurunan emisi yang telah di susun oleh Pokja TIPRE Kabupaten Merauke. Dengan sinergitas peran multipihak maka diharapkan kegiatan-kegiatan prioritas menuju pembangunan hijau di Kabupaten Merauke dapat dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing pihak.

Sinkronisasi aksi mitigasi prioritas dengan rencana strategis kabupaten merupakan strategi yang direkomendasikan agar kebijakan maupun rencana program dapat disesuaikan dengan kebijakan lokal daerah dan diharapkan tidak membebani daerah dari segi pelaksanaan program, pendanaan maupun kapasitas daerah itu sendiri.

*Text by: Yessi Dewi Agustina

consist of: the safety of the manageable customary community land; acceleration of the forming of the Forest Management Unit (KPH); and review of forest utilization and land-use permits. The internal enabling factors consist of RAD institutional factors, MRV and funding instruments.

The regent of the Merauke district who attended the Public Consultancy was very supportive of Pokja TIPRE and the initiatives on low-emissions development that are expected to be implemented in Merauke district. Dr. Romanus Mbaraka, MT said "Indonesia wants to make progress and so does Merauke. Thus, development must continue to run and it needs land. However, the land utilization should take the feasibility study into account, the results of which must state how the space will be used appropriately when it is developed. Development planning is essential because it is closely related to regional income, and land utilization for investment must be in accordance with the policy of carbon emission management".

Romanus also expects that through the existence of Pokja TIPRE, positive input regarding the policy on space as well as carbon emission management can be given to the government of Merauke district. Therefore, there is a need to improve development which not only promotes regional income, but also maintains and improves the function of environmental services that can be done well. All those things must be implemented in an integrated, systemic and unified way.

The improvement of multi-party roles starting from the policy planners, the technical implementer of the policy, the policy monitoring party to the community and other related parties in the development can be a driving force for the success of the implementation of low-emission action plans prepared by Pokja TIPRE in Merauke district. It is expected that by synergizing the roles of all related parties, the prioritized activities towards green development in Merauke district can be implemented in accordance with each party's role.

The synchronization of prioritized mitigation actions with the district strategic plans is a recommended strategy so that the policy and program plan are in harmony with local policy; it is also expected that it will no longer be a burden for the district from the program implementation, funding and local capacity points of view.

*Text by: Yessi Dewi Agustina



photo: Yessi Dewi Agustina/Wonder Agency Centre



photo: Yessi Dewi Agustina/Wonder Agency Centre

Sinergitas Rencana Kerja Bersama Pokja: Dari rencana menuju aksi bersama

Synergy of the work plan with the working group:
From planning to collective action

Pemaparan hasil study Capacity Development Need Assessment (CDNA) di tiga kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin dan Musi Rawas sebagai langkah awal sinkronisasi rencana kerja Pokja, menuju pembangunan rendah emisi di Provinsi Sumatera Selatan.

Presentation of the Capacity Development Need Assessment (CDNA) study results in the 3 districts of Banyuasin, Musi Banyuasin and Musi Rawas as the first step in the synchronization of the Pokja work plan toward low-emission development in South Sumatera Province.



Beberapa kegiatan yang terkait dengan penguatan kapasitas teknis dari kelompok kerja (Pokja) telah dilakukan oleh LAMA-I sejak awal Program. Untuk mengetahui atau mengevaluasi efektivitas penguatan teknis kapasitas, maka perlu untuk dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan informasi mengenai potensi maupun tantangan dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas. *Capacity Develeopment Need Assement* (CDNA) study merupakan sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja Pokja.

Kajian CDNA ini terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu; 1) Pengumpulan data sekunder; 2) Mengumpulkan data primer; dan 3) melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD). Tiga tahapan kegiatan CDNA ini diperlukan untuk dapat menilai kapasitas yang ada sekaligus mengidentifikasi kesenjangan kapasitas yang terjadi. Kajian CDNA ini juga diperlukan dalam upaya merumuskan kebutuhan penguatan kapasitas dan rencana aksi untuk setiap Pokja di tiga kabupaten lokasi program LAMA-I.

Mengacu pada hasil kajian CDNA, di temukan bahwa tingkat kompetensi anggota Pokja saat ini berbeda dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan, oleh karena ini perlu adanya kegiatan penguatan kapasitas yang dapat meminimalkan perbedaan tingkat kompetensi yang terjadi. Informasi hasil CDNA yang terdiri dari tingkat kompetensi Pokja saat ini, tingkat kesenjangan kapasitas yang terjadi saat ini dan kebutuhan kesenjangan kapasitas dan kebutuhan penguatan kapasitas untuk Pokja perlu dipaparkan pada pemangku kepentingan.

Untuk memaparkan hasil kajian CDNA tersebut maka program LAMA-I menggelar kegiatan Lokakarya CDNA di masing-masing kabupaten lokasi program LAMA-I. Lokakarya ini bertujuan untuk menyajikan hasil studi CDNA yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja pokja termasuk rencana aksi dari diskusi CDNA untuk tiga kabupaten. Kompilasi rencana aksi ini akan di diskusikan lebih terinci dengan masing-masing Pokja, agar kegiatan didaerah dapat tersinergi dengan baik dengan kegiatan program LAMA-I. Melalui kegiatan lokakarya ini dapat diketahui mengenai perkembangan penyusunan dokumen rencana aksi kabupaten yang sedang disusun oleh masing-masing Pokja.

Lokakarya CDNA dilakukan secara serial di tiga kabupaten, diawali di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 8 September 2015, di Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 9 September 2015 dan

Some activities related to the development of the working group (Pokja) technical capacity have been attempted by LAMA-I since the beginning of the program. A study to provide information regarding the potential and challenges in the implementation of capacity development was undertaken to determine or evaluate the effectiveness of the technical capacity development. A Capacity Development Need Assessment (CDNA) study is a study which is conducted to obtain information needed as the basis to prepare the work plan of the working group.

The CDNA study was divided into three phases: 1) Secondary Data Collection; 2) Primary Data Collection; 3) Implementation of Focus Group Discussion. The three CDNA phases are needed to assess the existing capacity as well as to identify gap capacity as it occurs. This study was also needed to formulate the needs of capacity development and an action plan for every working group in the three districts where LAMA-I programs are implemented.

The CDNA study found that the level of competency of the existing working group members differed from the expected ideal conditions; thus an activity on capacity development which can minimize competency level differences is needed. The results of the CDNA study consist of the current level of competency of the working group, the current level of the capacity gap, the needs to fill the capacity gap and the needs for capacity strengthening for the working group that have to be presented to the holders of interests.

A CDNA workshop was held by the LAMA-I program in every district where the program is being implemented to present the results of the CDNA study. Each workshop aimed to present the results of the CDNA study which is the basis for working group work plan compilation, including the action plans from CDNA discussions in the 3 districts. The compilation of those action plans will be discussed in detail with each working group; therefore, district activity can be fairly well synergized with LAMA-I program activity. Furthermore, these workshops will be able to monitor the progress on compiling district action plan documents by each working group.

A series of CDNA workshops was completed in the 3 districts: in Banyuasin district on the 8th of September 2015, in Musi Banyuasin on the 9th of September 2015 and in Musi Rawas on the 10th of September 2015. Each workshop involved discussion groups (FGD) to facilitate the process of understanding and

di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 10 September 2015. Lokakarya ini dilakukan dengan cara diskusi kelompok (FGD) untuk dapat memudahkan terjadinya proses pemahaman dan pertukaran informasi yang lebih mendalam. Hasil FGD di Kabupaten Banyuasin adalah perlu nya revisi terhadap SK Pokja, dari yang awalnya berjudul Pokja Perencanaan Tata guna lahan Mendukung Ekonomi Hijau dan Konservasi Biodiversitas (PTGL-EHKB) di usulkan menjadi “ Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kabupaten Banyuasin ”, diharapkan berdasarkan revisi atas judul SK Pokja maka ke depannya kinerja tim pokja tidak hanya sebatas pelaksanaan kegiatan terkait LAMA-I namun untuk semua kegiatan yang terkait dengan upaya pembangunan rendah emis. Tujuan revisi SK juga ini agar dapat mendukung seluruh sektor tidak hanya sebatas sektor berbasis lahan, dengan harapan dapat membuka potensi pendanaan untuk dapat mendukung pembangunan rendah emisi di kabupaten Banyuasin.

Diskusi kelompok juga membahas mengenai strategi untuk dapat mempromosikan aksi mitigasi yang telah diidentifikasi oleh Pokja Kabupaten Banyuasin sebagai upaya untuk mengarus utamakan kegiatan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan memastikan bentuk kegiatan dari Rencana Aksi penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) yang dapat diintegrasikan ke dalam rencana kegiatan tahunan di level kabupaten. Proses pengarusutamaan aksi mitigasi ini ke dalam rencana pembangunan daerah perlu di lakukan kepada tingkat pengambil kebijakan, contohnya adalah kepala dinas, sehingga dapat terus di lakukan proses pendampingan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Setelah hasil kajian CDNA dan diskusi mengenai perkembangan Pokja di Kabupaten Banyuasin, seluruh pihak terkait menyepakati untuk penyusunan rencana kerja Pokja yang akan di lakukan pada akhir bulan September 2015. Menyusun Rencana Kerja Pokja: diagendakan minggu ke-4 September 2015.

Lokakarya CDNA dilanjutkan di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 11 September 2015, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Musi Rawas menghasilkan beberapa poin penting. Hasil Kajian Studi CDNA ini penting untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Dengan berbagai informasi yang didapatkan melalui studi CDNA tersebut maka kedepannya Pokja dapat menyusun rencana kerja yang lebih

information sharing in detail. The results of FGD in Banyuasin district revealed the need for revision of the working group decree (SK), which in the beginning was titled “Work Group of Land Management Planning in support of Green Economy and Biodiversity Conversion (PTGL-EHKB)” and was suggested to be changed to “The Establishment of the Working Group of Climate Change in Banyuasin District”. It is expected that by revising the decree title, the work performance of the working group will no longer be limited to the implementer of the LAMA-I program, but will in future include all activities which are related to low-emission development. The purpose of the decree revision is to support all sectors, not only the land-based sector, with the hope that it will open funding potential to support low-emission development in Banyuasin district.

The group discussion also considered the strategy to promote mitigation actions which have been identified by the working group in Banyuasin district as an attempt to mainstream (to tag) the activity into the regional development planning and ensure the kind of Greenhouse Emission Reduction Action Plan (RAD-GRK) which can be integrated into the yearly activity plan at the district level. The process of mainstreaming (tagging) the mitigation actions into the regional development plan needs to be done at the level of policy-makers, such as the Head of local unit agency; thus, it can be followed up by the guidance process when preparing the work and budget plans. After presenting the results of the CDNA study and discussion on the progress of the working group in Banyuasin district, all related parties agreed to prepare the working group work plan by the end of September 2015. It was scheduled to be done in the 4th week of September.

The CDNA workshop continued in Musi Rawas district on the 11th of September 2015, being located in the Bappeda Musi Rawas office and resulted in some crucial points. The CDNA study results need to be delivered to the holders of interests. Using the information obtained through the CDNA study, the working group is expected to be able to prepare an appropriate work plan in the future that is synergized with the work plan of the planning unit in Musi Rawas district. Coordination activity needs to be regular, so that all activity planning can be conducted well.

The Head of Bappeda in Musi Rawas district, Ir. H. Suharto Patih, MM, said “It is through the presentation of results of the CDNA study which was conducted by the LAMA-I program that all related parties can obtain information regarding the needs to strengthen capacity that have been achieved and regarding the ones that



tepat dan tersinergi dengan rencana kerja unit perencanaan di kabupaten Musi Rawas. Kegiatan koordinasi juga perlu untuk dilakukan secara rutin, agar setiap perencanaan suatu kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas, Ir H Suharto Patih MM menyampaikan bahwa “melalui pemaparan hasil studi CDNA yang dilakukan oleh program LAMA-I, maka semua pihak terkait mendapatkan informasi mengenai kebutuhan penguatan kapasitas yang sudah dilakukan atau masih perlu untuk dilakukan, sehingga ke depannya kebutuhan tersebut dapat dipersiapkan dan di agendakan dengan baik di dalam rencana kerja Pokja bersama program LAMA-I”. Penyusunan rencana kerja Pokja REDD+ Kabupaten Musi Rawas akan dilakukan setelah kegiatan High Level Meeting program LAMA-I pada bulan November 2015.

Lokakarya CDNA yang menurut jadwal akan dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penundaan yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam struktur Pokja PTGLH-EHKB Musi Banyuasin. Namun hasil dari kajian CDNA telah di sampaikan melalui laporan tertulis kepada Pokja Kabupaten Musi Rawas.

Tindak lanjut dari lokakarya CDNA yang telah di selenggarakan ini yaitu tim LAMA-I akan berkoordinasi dengan Bappeda provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi Pokja dengan LAMA-I. Sehubungan dengan pelaksanaan lokakarya di tingkat nasional pada Januari 2015, masing-masing Pokja di tiga kabupaten akan menyelesaikan dokumen pembangunan rendah emisi yang akan di sampaikan di lokakarya nasional tersebut, sebagai bentuk pencapaian atas proses inisiatif dan kerja keras Pokja di tiga kabupaten dalam mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Sumatera Selatan yang akan berkontribusi terhadap penurunan emisi secara nasional.

*Text by: Yessi Dewi Agustina



still need to be conducted; therefore, those needs can be prepared and scheduled into the working group work plan together with the LAMA-I program”. The preparation of the REDD+ working group work plan in Musi Rawas district will be conducted after the High Level Meeting of the LAMA-I program in November 2015.

The CDNA workshop which was scheduled to be held in Musi Banyuasin district had to be postponed due to the changing structure of the PTGLH-EHKB working group of Musi Banyuasin. However, a written report of the CDNA study has been delivered to the working group in Musi Rawas district.

As follow-up to the CDNA workshops, the LAMA-I team will coordinate with the Bappeda of South Sumatera Province on the implementation of activity between the working group and LAMA-I. In connection with the undertaking of the workshop at the national level in January 2016, each working group in the three districts will complete low-emission development documents to be presented at the national workshop, as a indication of the achievements of the initial process and the hard work of the working group in the three districts in supporting the materialization of green economy development in the province of South Sumatera which will contribute to emission reduction on national scale.

*Text by: YessiDewi Agustina



Biografi Hana Hikoyabi Menyuarakan aspirasi perempuan dibawah langit Papua

The Biography of Dra Hana Hikoyabi

Voicing the aspiration of women
under the sky of Papua

“Tuntutlah ilmu setinggi langit” merupakan pepatah tua yang artinya langit tidak terbatas, maka terus lah belajar selama hidup, prinsip inilah yang diturunkan oleh Ayahanda Dra Hana Hikoyabi kepada anak-anaknya. Sang ayah yang merupakan seorang guru, mengharuskan seluruh anak-anaknya untuk bersekolah. Lahir sebagai anak ke-empat dari delapan bersaudara dari Pasangan Soleman Hikoyabi dan Hermina Matuy, Hana mengenyam pendidikan dasarnya dengan jalan yang tidak mudah. Fasilitas pendidikan yang belum memadai ditambah dengan sarana yang terbatas menuju sekolah tidak menyurutkan langkah Hana dan untuk pergi ke sekolah, walaupun dia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Pendidikan, ia rasakan sebagai satu-satunya tumpuan untuk memajukan hidupnya.

“Seek knowledge as high as the sky” is an old proverb which means the sky is limitless, therefore you have to educate yourself as long as you live; it was this principle that was passed on by the father of Dra. Hana Hikoyabi to his children. Her father was an educator who obliged his children to study. Being born as the fourth child of eight siblings of Soleman Hikoyabi and Hermina Matuy, Hana got her first education the hard way. Inadequate education facilities with limited access to transportation didn't stop her from going to school. She traveled quite a long distance by walking. She was truly aware that education was her only way to improve her life.

Hana's childhood wasn't only about studying. Hana and other family members were actively involved in

Masa kecil Hana selain diisi oleh belajar, Hana beserta anggota keluarga lainnya juga terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di Kampung nya. Sang Ayah yang menjabat sebagai kepala suku di Kampung Ifale tempat Hana lahir dan dibesarkan, berkewajiban untuk mengurus dan menjaga warga kampung nya, hal itulah yang membuat Hana belajar memiliki tanggung jawab sedari usia muda. Hana merasa masa kecilnya sangat menyenangkan dan penuh dengan pelajaran berharga, masa dimana kehidupan masyarakat sangat harmonis, seluruh masyarakat saling membaur tanpa saling membedakan satu sama lain. Pada masa itu tuntutan hidup dirasakan tidak terlalu banyak, modernisasi dan teknologi sekarang menjadi salah satu tuntutan yang tidak bisa hindari.

Sedari kecil Hana selalu berkeinginan agar kaum perempuan di Papua untuk lebih maju, menurutnya Perempuan di Papua Jujur dan punya kualitas manajerial yang tinggi. Menjadi wakil ketua Majelis Rakyat Papua periode 2005-2011 ia memanfaatkan sebagai akses untuk dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan Papua. Hana merasa perempuan dan anak-anak menjadi kaum yang termarginalkan di Papua. Keberpihakan terhadap perempuan dan anak-anak sangat kurang dirasakan, hal itu lah yang ia rasakan menjadi penyebab utama perempuan Papua tidak semaju perempuan di pulau Jawa pada umumnya. Berbagai permasalahan mulai dari faktor kekerasan yang sering terjadi pada perempuan, kurangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, sampai kesempatan di dunia ekonomi yang lebih didominasi oleh kaum lelaki.

Walaupun sempat tidak dilantik ketika kembali menjabat di Majelis Rakyat Papua untuk kedua kalinya di tahun 2011 tidak menyurutkan langkah wanita yang lahir di Papua 46 tahun silam, untuk terus melanjutkan perjuangannya membela hak perempuan dan anak-anak di Papua. Kegemarannya membaca dan menulis menjadi salah satu instrumen yang ia pilih untuk menyuarakan aspirasi perempuan. Kebebasan berbicara dan menuliskan apa yang dirasakan perempuan di Papua ia tuangkan dengan mendirikan tabloid Suara Perempuan sekaligus menulis untuk tabloid tersebut. Melalui media tabloid ini ia mengajak perempuan Papua untuk dapat lebih bebas menyuarakan aspirasi nya, ia menganggap media sangat strategis untuk menyambung pikiran dan mendukung kebijakan yang sama antara perempuan dan laki-laki.

her community's activities. Hana's father, who was the village leader of Ifale, was in charge of taking care of and protecting the villagers. This was how she learnt to accept responsibility at a young age. Hana felt that her childhood was very memorable and full of priceless life lessons; times when people lived in harmony and they inherently connected to each other without imposing segregation on others. There were less life demands at that time; modernization and technology have become unpreventable demands nowadays.

Since she was a child, Hana has always wanted Papuan women to improve their lives. She realizes that they are honest and have high managerial ability. She utilized her position as the Chairman of the Papua Peoples Chamber during the period 2005–2011 to improve the empowerment of Papuan women. She was aware that women and children were the marginalized groups in Papua. There was a bias against women and children, which was the main reason why Papuan women had less personal development opportunities compared to women in Java in general. Some problems stemmed from violence which is often experienced by women in Papua, the lack of opportunity to get quality education, and from limited opportunities in an economic world dominated by men.

Hana, who was born 46 years ago, never ceased to fight for women and children's right in Papua, although she was not inaugurated when she was appointed for the second time as the Chairman of the Papua People Chamber in 2011. Her reading and writing hobbies are her instruments to voice women's aspirations. That freedom of speech and writing about what women feel in Papua transformed in founding the Suara Perempuan (The Women's Voice) tabloid. She inspired Papuan women to freely voice their aspirations through the tabloid. She considers the media to be strategic in connecting thoughts and supporting equal policies between women and men.

Hana's effort was not only in the form of her writing, as she also established some foundations such as the Association of Women which originated from Sentani, the Foundation of Papua Women and Children Empowerment, as well as the Nakhemia Multi-Purpose Cooperative of Sentani Women. This cooperative is one of Hana's ways of helping women who have to struggle for their families. Women are given the chance to start a business through the savings and loan system in this cooperative. There is also a space for women to display their handicrafts such as souvenirs that can be sold and be of use.

Tidak hanya dalam bentuk tulisan, Hana juga mendirikan beberapa yayasan seperti Ikatan Perempuan Asal Sentani, Yayasan Lembaga Pemberdayaan Anak dan Perempuan Papua juga turut mendirikan Koperasi Serba Usaha Nakhemia Perempuan Sentani. Koperasi ini menjadi salah satu cara untuk Hana dapat membantu perempuan yang harus berjuang demi keluarga. Di koperasi ini perempuan diberikan kesempatan untuk berusaha melalui sistem simpan pinjam dan tersedia ruang untuk menunjukan hasil karya berupa cinderamata yang di dapat diperjual belikan dan memberikan manfaat bagi para perempuan.

Kesemuanya ia lakukan demi mencapai kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki di Papua. Upaya-upaya yang ia lakukan dibarengi dengan terus memberikan penyadartauan dan sosialisai kepada kaum perempuan, bahwa mereka memiliki potensi namun perlu ditingkatkan dan memiliki strategi yang tepat sekaligus menurunkan arogansi yang dimiliki agar lebih mempertimbangkan kepentingan orang banyak ketimbang ego masing-masing. Hana berusaha untuk selalu terlibat dalam berbagai diskusi dan pelatihan, untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kesamaan peluang bagi perempuan, ia percaya ketika perempuan sudah bisa menunjukan kapasitas yang dimiliki maka mudah untuk ditularkan kepada perempuan lain.

Sejalan dengan upaya yang ia lakukan untuk para perempuan di Papua, semangat yang sama pun ia tunjukan ketika terlibat dalam kegiatan program ParCiMon (*Participatory by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies*) yang didanai oleh Uni Eropa dan LAMA-I (*Locally-appropriate mitigation actions in Indonesia*). Hana terlibat aktif dan sangat mendukung kinerja dari kelompok kerja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (Pokja IPRE) kabupaten Jayapura.

Berbagai kegiatan yang di lakukan oleh Program ParCiMon dan LAMA-I di anggapnya memberikan pemahaman baru yang sangat bermanfaat. Selain membantu pemerintah daerah Jayapura namun juga memberikan penyadartahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan mengelola hutan. Dari upaya penyadartahuan dan pelatihan yang diberikan baik kepada pemerintah, masyarakat



Hana did all of this to achieve equality between women and men in Papua. Her efforts were in line with raising awareness and socialization among women; they have potential that needs to be improved and requires a proper strategy—as well as reducing the arrogant behavior displayed by others—by putting the interests of the people first instead of egos. Hana always tries to involve herself in various discussion and training activities to improve capacity building and to develop equal opportunity for women. She believes that once a woman is able to perform to her capacity, it is easier to spread the word to other women.

In parallel with Hana's efforts for the women in Papua, the same spirit was shown when she was involved in ParCiMon (Participatory by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies) program activities funded by the European Union and LAMA-I (Locally-appropriate mitigation actions in Indonesia). Hana was actively involved and very supportive toward the performance of the Low-emissions Development Initiative working group (known locally as Pokja IPRE)

She reckoned the various activities undertaken by the ParCiMon program and LAMA-I provided new beneficial understanding. They were not

dan pihak terkait lainnya dapat terbangun suatu kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam mengelola hutan sebagai tempat pembelajaran dan juga kamus hidup yang bersama, yang menjadi tanggung jawab bersama sehingga dapat mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan bersama.

Dengan adanya Pokja, Ia merasakan adanya kemajuan yang sangat baik dalam rangka peningkatan kapasitas daerah dan menjadi wadah untuk SKPD terkait saling bersinergi dalam program kegiatan perencanaan daerah. Peningkatan kapasitas diantara para anggota Pokja Ia rasakan cukup merata, masing-masing anggota mulai menunjukkan kemampuannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan di dapatkan dari berbagai kegiatan baik pelatihan teknis maupun kelembagaan yang diberikan melalui program ParCiMon dan LAMA-I.

Ketua Pokja IPRE yang kebetulan juga seorang perempuan Ia rasakan juga sebagai nilai lebih. Melalui tuntunan yang diberikan oleh Yos Levi Loku sebagai ketua Pokja menjadikan Pokja IPRE ini dapat menjadi tim baik dan solid. Pokja IPRE sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik akan pentingnya upaya keberlanjutan dari program yang dijalankan, tentunya ilmu ini Ia harapkan dapat menjadi bekal dan lebih di tingkatkan lagi dalam proses implementasi di masa depan.

“Acungkan telunjuk jiwamu setinggi langit, untuk mengerti makna hari ini, dan hari esok” merupakan moto hidup perempuan Hana yang baru saja di anugrahi penghargaan tertinggi dari Aliansi Jurnalis Indonesia yaitu Trimurti Award atas jasanya dalam memperjuangkan kebebasan perempuan dalam Pers. Moto hidup yang di milikinya membuat Ia berkeyakinan dapat mencapai apa yang di inginkan walaupun keinginannya belum tentu dapat terlihat namun dengan keyakinan dan bekerja “*all out*” Ia dapat melewati halangan apapun bahkan batasan langit sekalipun.

Hana mengharapkan penghargaan yang dapat berguna baik secara pribadi maupun profesional dapat diberikan kepada para anggota Pokja IPRE atas kerja keras yang di berikan oleh anggota Pokja IPRE. Sehingga Pokja IPRE dapat terus menjadi Pokja yang terdepan dan konsisten sekaligus kompeten untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di tanah papua.

Text by: Yessi Dewi Agustina

only helpful for Jayapura local government, but also have raised society's awareness about the importance of protecting and managing the forest. It is based on that awareness and training given to the government, community and other related parties that has produced good collaboration and cooperation in managing the forest as a place of life learning and as a reference source as a part of the collective responsibility to optimize the fulfillment of collective needs.

It was through the formation of the working group that Hana saw a relatively good improvement in terms of increasing the local capacity and becoming the vessel for the related SKPD to synergize with the local activity planning program. She was aware that the increasing capacity among members of working group was equally distributed; each member has shown their ability based on the skill they have which was gained from various activities either technical or institutional training provided by the ParCiMon and LAMA-I programs.

The head of working group IPRE, who happens to be a woman, was also a plus for Hana. working group IPRE has become a good, solid team under the guidance of Yos Levi Loku, the chairwoman. working group IPRE has a better understanding now regarding the importance of simultaneous effort in running the program. She hopes that this knowledge can be improved in the implementation process in the future.

“Point your finger as high as the sky to find the meaning of today and tomorrow” is the life motto of Hana, who has just been awarded the highest award from the Indonesian Journalists Alliance—the Trimurti Award—for her service in fighting for women's freedom in the press. Her life motto has made her believe that she could achieve anything she wants, although it may not yet be visible, but with that belief and working as hard as possible, she could surmount any obstacles, even the limitless sky.

Hana also wishes that awards, which are both individually and professionally useful, could be given to members of the working group IPRE for their hard work; therefore working group IPRE may always be at the forefront and be a consistent as well as competent working group to support simultaneous green economic development in Papua.

Text by: Yessi Dewi Agustina



ParCiMon is designed to support Papua in achieving its low-emission development goal and contributing significantly to Indonesia's overall low-emission development as an integral part of climate-change strategies. It focuses on building the capacity of key civil society groups in Papua to participate and monitor the planning cycle of low-emission development from land-based sector

***ParCiMon** didesain guna mendukung Papua mencapai pembangunan rendah emisi sebagai wujud kontribusi Papua dalam mensukseskan strategi mitigasi perubahan iklim nasional melalui program pembangunan kapasitas masyarakat sipil pada proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan rendah emisi berbasis lahan*

LAMA-I aims to strengthen the capacity of key local governments to develop integrated low-emission development plans as part of Indonesia's nationally appropriate mitigation actions

***LAMA-I** berupaya membangun kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan rendah emisi yang terintegrasi sebagai bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim nasional*

World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416
www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia
blog.worldagroforestry.org/



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK
DANIDA INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COOPERATION



Research
Program on
Forests,
Trees, and
Agroforestry



giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

